

PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MODERNISASI PASAR BESAR

**(Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan Pasar Besar
Kota Batu)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Gelar Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**



Disusun Oleh:

**DONI FAJAR PRANDANA
125030500111024**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MINAT ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
MALANG
2017**

MOTTO

“Pengalaman Terbaik Adalah Apa Yang Kita Alami Dalam Kehidupan”

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Peranan Pemerintah Daerah Dalam Modernisasi Pasar
Besar. (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah, dan Pasar Besar Kota Batu)

Disusun oleh : Doni Fajar Prandana

NIM : 125030500111024

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

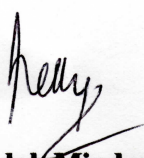
Minat : Administrasi Pemerintahan

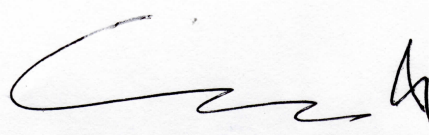
Malang, 29 Desember 2016

Komisi Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing


Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si
NIP. 19690524 200212 2 002


Dr. Hermawan, S.IP, M.Si
NIP. 19720405 200312 1 001

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 12 Januari 2017
Jam : 11.00 – 12.00
Skripsi atas nama : Doni Fajar Prandana
Judul : Peranan Pemerintah Daerah dalam Modernisasi Pasar Besar (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan Pasar Besar Kota Batu)

Kamis, 12 Januari 2017

Dan Dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



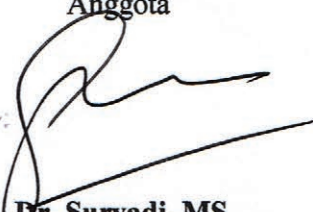
Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si
NIP. 19690524 198601 1 002

Anggota



Dr. Hermawan, S.IP, M.Si
NIP. 19720405 200312 1 001

Anggota



Dr. Suryadi, MS
NIP. 19601103 198703 1 003

Anggota



Drs. Minto Hadi, MS
NIK. 19540127 198103 1 003

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dinyatakan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 29 Desember 2016



Doni Fajar Prandana
NIM. 125030500111024

RINGKASAN

Doni Fajar Prandana, 2016, **Peranan Pemerintah Daerah Dalam Modernisasi Pasar Besar (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Pasar Besar Kota Batu)** Ketua Pembimbing: Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si, Anggota: Dr. Hermawan, S.IP, M.Si, 126

Fasilitas pasar besar Kota Batu kurang memadai dan bermunculan pasar modern di Kota Batu. Pemerintah Kota Batu mengadakan program modernisasi pasar besar dan dikerjasamakan dengan PT. Panglima Capital Iqoni. Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah kota Batu menggunakan metode Bangun Serah Guna.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengetahui dan mendeskripsikan peranan pemerintah dan faktor yang mempengaruhi modernisasi pasar besar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi

Hasil dari penelitian ini diperoleh data bahwa peranan pemerintah dalam modernisasi pasar adalah sebagai (a) Stabilisator karena munculnya konflik tentang luasan dan harga cicilan kios yang ditawarkan pihak investor.(b) Modernisator, pemerintah mengajak pedagang untuk merubah kondisi tempat dan tatacara berjualan pedagang. Pemerintah memiliki upaya dalam mewujudkan keberhasilan program pembangunan pasar dengan menunjuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku TKKSD untuk mensosialisasikan serta mengevaluasi draft MOU. Dalam evaluasi pemerintah mendapatkan fungsi pengawasan. Faktor yang mempengaruhi program modernisasi pasar besar adalah (a) Efisiensi program modernisasi pasar besar, dengan di modernisasi pasar besar makan akan memaksimalkan sumber daya. Pedagang liar akan masuk ke dalam kios pasar. dan bantuan dari investor mampu memperingan belanja daerah. (b) Efektifitas program modernisasi pasar besar adalah mempercepat pembangunan yang ada di Kota Batu serta tetap mendapatkan pemasukan dari adanya pasar besar kota batu

Pemerintah seharusnya memberikan hak paten tertulis yang berbadan hukum tentang penggunaan kios dan luas kios dan memikirkan kondisi perekonomian pedagang pasar besar untuk mengakumulasi jumlah kemampuan bayar pedagang.

Kata kunci : Peranan Pemerintah Dalam Memodernisasi Pasar Besar Kota Batu

SUMMARY

Doni Fajar Prandana, 2016, **The Role of Local Government in the Great Market Modernization** (Study on Financial Management Board and Asset and Large market town Batu) Chairman Advisor: Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si, Members: Dr. Hermawan, S.IP, M.Si, 126

Large market facility Batu inadequate and popping modern market in Batu which led to a decrease in the number of visitors Batu government held a large market modernization program and in cooperation with PT. Panglima Iqoni. Cooperation by the government of Batu method wake up the transfer order

This study aims to analyze, identify and describe the role of government and the factors that influence the modernization of a large market. The method used is descriptive research with a qualitative approach. The technique used is interview, observation and documentation

results from this study data showed that the government's role in the modernization market is as (a) Stabilizer because of conflicts on the extent and price installment kiosks offered by the investor. (b) Modernisator, the government invites traders to changing conditions and procedures of selling the merchant. The government has an effort in realizing the success of market development programs by pointing Financial Management Board and Asset TTKSD to socialize as well as evaluating the draft MOU. In the evaluation of the government to get the monitoring function. Factors affecting the large market modernization program is (a) Efficiency huge market modernization program, with a large meal in the modernization market will maximize resources. Illegal traders will enter into a market stall. and the help of investors able to lighten the shopping areas. (b) The effectiveness of the modernization program of the big market is accelerating development in Batu and still get revenue from their large market town of Batu

Governments should grant patents written legal entities on the use of stalls and spacious stalls and thinking about economic conditions trader large market to accumulate the number of ability to pay merchants.

Keywords: Role of the Government in the Great Market Modernize Batu

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat, anugerah serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Peranan Pemerintah Daerah Dalam Modernisasi Pasar Besar (Studi pada Badan Pegelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Pasar Besar Kota Batu)**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (SAP) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
3. Bapak Dr. Luqman Hakim, M.Sc selaku Ketua Minat Ilmu Administrasi pemerintahan;
4. Bapak Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan banyak arahan dalam dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Hermawan, S.IP, M.Si selaku Anggota Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak arahan dalam dalam penulisan skripsi ini;

6. Bapak dan Ibu dosen Minat Ilmu Administrasi Pemerintahan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;

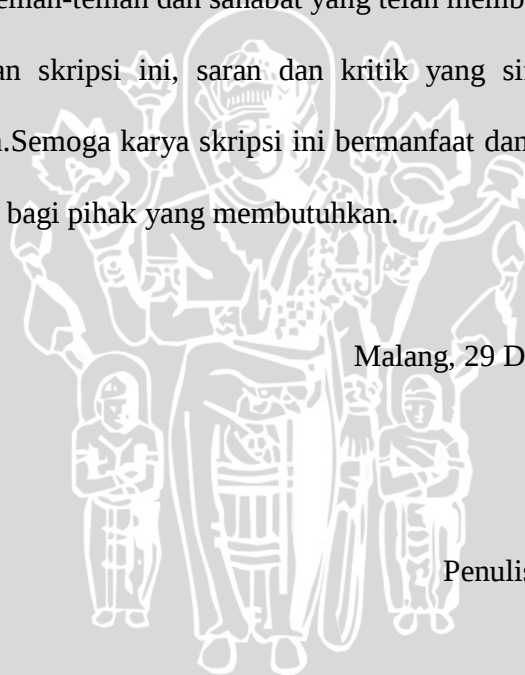
7. Pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas ini:

8. Serta keluarga, teman-teman dan sahabat yang telah membantu selama ini

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 29 Desember 2016

Penulis



DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kontribusi Penelitian.....	8
E. Sistematika Pembahasan	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Administrasi Publik.....	12
1. Pengertian Administrasi	12
2. Pengertian Publik	15
3. Pengertian Administrasi Publik.....	16
4. Ruang Lingkup Administrasi Publik.....	18
5. Hubungan Antar Dimensi Publik.....	19
6. Kegiatan Administrasi Publik	21
B. Pemerintah Daerah.....	23
1. Pengertian Pemerintah Daerah.....	23
2. Fungsi Pemerintah Daerah	24
3. Asas Pemerintah Daerah	24
4. Karakteristik Pemerintah Daerah	25
C. Otonomi Daerah	30
1. Pengertian Otonomi Daerah.....	30
2. Prinsip Otonomi Daerah.....	31
3. Tujuan Otonomi Daerah.....	33
D. Peranan Pemerintah.....	34
1. Pengertian Peranan.....	34
2. Pengertian Pemerintah	35
3. Peranan Pemerintah.....	35

E. Modernisasi	38
1. Pengertian Modernisasi	38
2. Aspek Modernisasi	39
3. Proses Modernisasi	41
4. Krisis Yang Ditimbulkan	41
F. Pasar	42
1. Pengertian Pasar	42
2. Fungsi Pasar	43
3. Jenis Pasar	44
4. Peranan Pasar	47
G. Kerjasama	49
1. Pengertian Kerjasama	49
2. Bentuk Kerjasama Daerah	52
3. Prosedur Kerjasama	53
4. Ruang Lingkup Bidang-Bidang Yang Di Kerjasamakan	55
5. Kerjasama di Antara Daerah-Daerah Tingkat I	57

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	58
B. Fokus Penelitian	58
C. Lokasi dan Situs Penelitian	59
D. Sumber dan Jenis Data	61
E. Teknik Pengumpulan Data	64
F. Instrumen Penelitian	65
G. Analisis Data	67

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

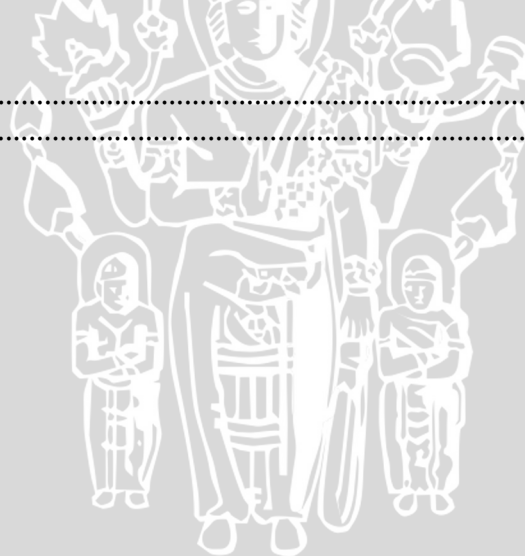
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	70
1. Wilayah Kota Batu	70
2. Kondisi Geografis dan Demografis	73
3. Pemerintahan	74
4. Pendapatan Regional Bruto	75
5. Visi Misi Kota Batu	76
B. Profil Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	77
1. Visi Misi	77
2. Struktur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	79
C. Profil Pasar Besar	82
D. Penyajian Data	83
1. a. Peranan Pemerintah dalam Modernisasi Pasar Besar Kota Batu	86
(a) Stabilisator Modernisasi Pasar Besar Kota Batu	87
(b) Modernisator Modernisasi Pasar Besar Kota Batu	90
b. Upaya Pemerintah dalam Modernisasi Pasar Besar	

Kota Batu	91
2. Faktor yang Mempengaruhi Modernisasi Pasar Tradisional	101
a. Efisiensi Modernisasi Pasar Besar	101
b. Efektifitas Modernisasi Pasar Besar	103
E. Pembahasan	106
1. a. Peranan Pemerintah dalam Modernisasi Pasar Besar	
Kota Batu	110
(a) Stabilisator Modernisasi Pasar Besar Kota Batu	110
(b) Modernisator Modernisasi Pasar Besar Kota Batu	112
b. Upaya Pemerintah dalam Modernisasi Pasar Besar	
Kota Batu	113
2. Faktor yang Mempengaruhi Modernisasi Pasar Besar Kota Batu	120
a. Efisiensi Modernisasi Pasar Besar Kota Batu	120
b. Efektifitas Modernisasi Pasar Besar Kota Batu	122

BAB V PENUTUP

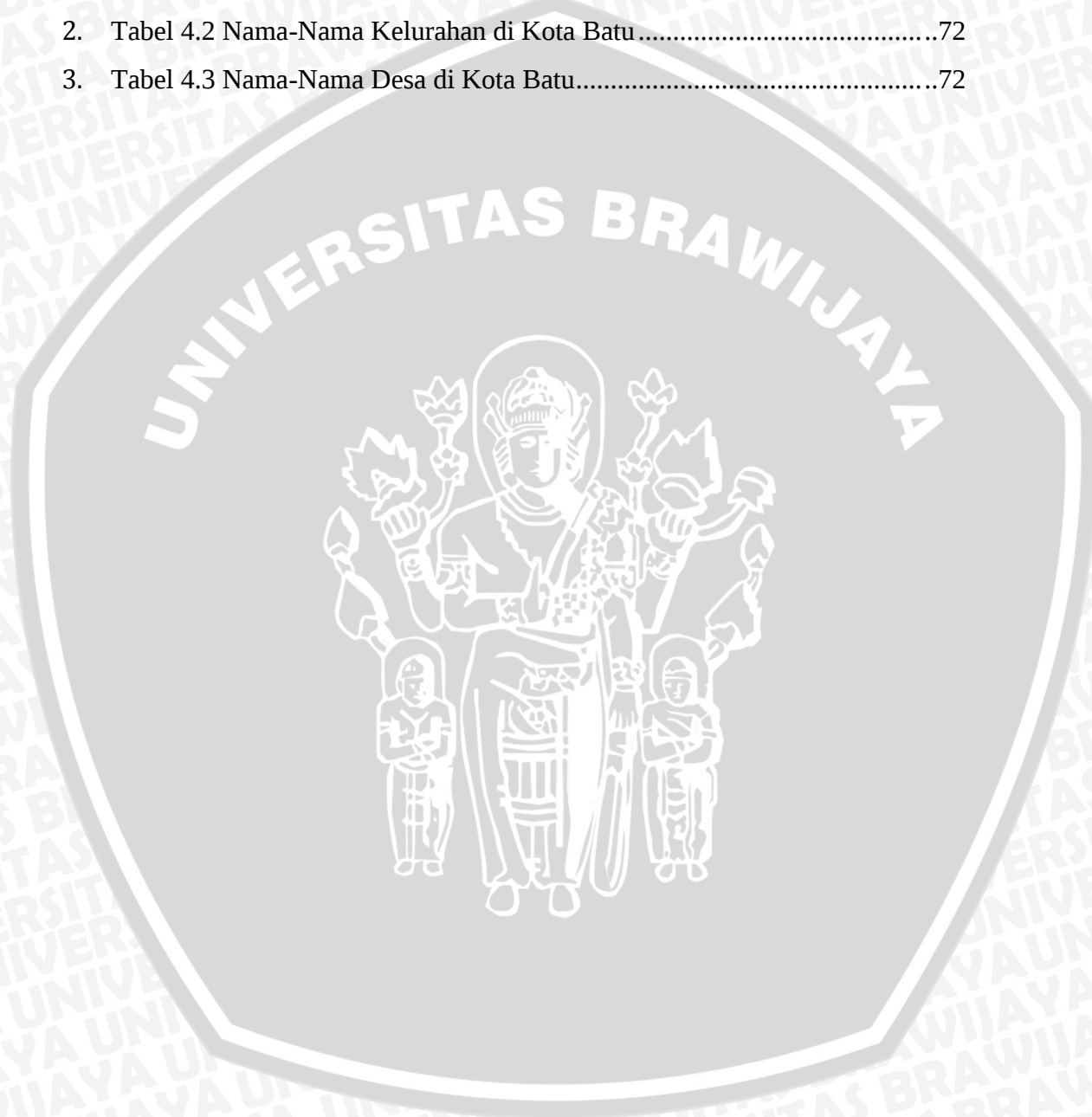
1. Kesimpulan	124
2. Saran	126

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

1. Tabel 4.1 Nama-Nama Kecamatan di Kota Batu..... 71
2. Tabel 4.2 Nama-Nama Kelurahan di Kota Batu.....72
3. Tabel 4.3 Nama-Nama Desa di Kota Batu.....72



DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.1 Struktur Ekonomi Kota Batu Tahun 2013	4
2. Gambar 2.1 Mekanisme Jual-Beli di Pasar Tradisional.....	46
3. Gambar 3.1 Komponen Analisis Data: Mode Interaktif.....	68
4. Gambar 4.1 Peta Kota Batu.....	73
5. Gambar 4.2 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	77
6. Gambar 4.3 Struktur Organisasi BPKAD.....	79
7. Gambar 4.6 Pasar Besar Kota Batu.....	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi pemerintahan publik adalah suatu peranan dalam misi pemberian pelayanan kepada masyarakat. Menurut Chandler dan Plano dalam Indradi (2006:113), administrasi publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Peranan administrasi publik sangatlah vital dalam suatu negara. Karena administrasi publik menentukan bagaimana sistem ketatanegaraan berjalan sesuai dengan kondisi negara dan kebijakan yang berlaku. Pemerintah harus mengatur dan menjalankan sebuah kebijakan yang bertujuan untuk melayani masyarakat. Mengerti apa yang di butuhkan oleh masyarakat untuk mencapai sistem pemerintahan yang baik (*good governance*).

Model pemerintahan *good governance* mengandung beberapa unsur yang menjadikan indikasi model pemerintahan *good governance*. Menurut Bhatta dalam Sedarmayanti (2004:5), unsur utama *good governance* adalah akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), keterbukaan (*openness*), aturan hukum (*rule of law*), hak asasi manusia (*human rights*). Keempat unsur dalam *good governance* sudah digunakan di dalam sistem pemerintahan Negara Republik

Indonesia. Karena dengan adanya acuan unsur-unsur yang terdapat di dalam model pemerintahan *good governance*, pemerintah mampu mengembangkan kualitas kinerja pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang. Di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan terdapat 34 provinsi dan sistem pemerintahan terpusat di daerah khusus ibukota Jakarta. Namun pemerintahan pusat memberikan otonomi kepada daerah untuk mengurus daerahnya sendiri.

Otonomi yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan prinsip dekonsentrasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 11 yang menyebutkan:

“Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.”

Langkah dekonsentrasi diterapkan oleh pemerintah Indonesia guna menjangkau kebutuhan masyarakat dan terjangkaunya perkembangan infrastruktur di daerah yang berada jauh dari pemerintahan pusat. Selain urusan di bidang administrasi pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah di bidang fiskal. Dengan demikian, berarti semua urusan, tugas, dan wewenang pelaksanaan pemerintahan diserahkan sepenuhnya kepada daerah.

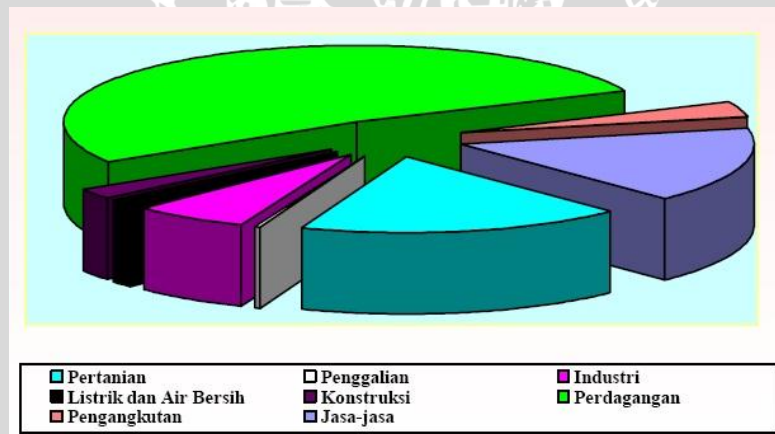
Dengan terselenggaranya otonomi seluas luasnya maka diperlukan pengaturan yang adil dan selaras mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan

sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah daerah memiliki pendapatan yang bersumber pada pendapatan asli daerah yang bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah. Pemerintah pusat memberikan dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan di bidang fiskal antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan antar pemerintah daerah. Pinjaman daerah yang bertujuan memperoleh sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah. Lain-lain pendapatan bertujuan memberikan peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan yang sah.

Pendapatan yang di dapat pemerintahan daerah dipergunakan untuk membangun infrastruktur di daerah yang tertulis di dalam Anggaran Pendapatan Daerah APBD. Selain pemerintah daerah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai hak melakukan kerjasama dengan swasta dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya buatan. Pembuatan infrastruktur di daerah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyebutkan Penataan Ruang adalah sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang. Adanya dasar hukum pengaturan ruang ini. Struktur pola infrastruktur pembangunan sesuai dengan penyusunan dan pelaksanaan program yang sesuai dengan pembiayaan sehingga

dampak negatif pembangunan di sisi pendanaan mampu terminimalisir dengan adanya dasar hukum. Salah satu kota yang mendapatkan otonomi untuk mengembangkan infrastruktur dari pendanaan pemerintah pusat adalah Kota Batu.

Kota Batu terbentuk atas dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kota Batu. Dengan dasar Undang-Undang Pemerintah Kota Batu memiliki otonomi sendiri di dalam mengurus kebutuhan daerahnya. Perkembangan infrastruktur di Kota Batu lebih terkenal dengan ikon kota pariwisata. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Batu, Pertumbuhan ekonomi di Kota Batu di dorong oleh sektor perdagangan. Hal tersebut dapat dilihat di dalam gambar berikut:



Gambar 1: Struktur Ekonomi Kota Batu Tahun 2013
Sumber: www.batukota.bps.go.id

Gambar 1 menjelaskan bahwa sektor pedagang sangat berperan di dalam meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PRDB) Kota Batu. Dengan memperhatikan gambar 1 dapat diperkirakan banyak penduduk yang berprofesi sebagai pedagang. Dimana proses perdagangan di harapkan mampu meningkatkan pertumbuhan nilai perekonomian di Kota Batu. Salah satu Pasar yang sangat

berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah kegiatan pasar Besar Kota Batu. Pasar Besar Kota Batu adalah pasar utama dan pasar terbesar yang berada di kawasan Kota Batu. Lokasi pasar tersebut terletak di Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu. Lokasi Pasar Besar Kota Batu sangat strategis karena dilalui oleh wisatawan yang berkunjung di Kota Batu. Pasar Besar Kota Batu sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kota Batu untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Produk yang dijual di Pasar Besar Kota Batu merupakan produk asli dari masyarakat Kota Batu sendiri. Sebagian petani Kota Batu menjual hasil pertaniannya di Pasar Besar Kota Batu bagian barat. Namun keberadaan Pasar Besar Kota Batu semakin lama pengunjungnya semakin berkurang. Hal ini disebabkan karena banyak pasar modern yang muncul dengan jaraknya yang dekat dengan Pasar Besar. Akibatnya, Pasar Besar yaitu salah satunya adalah Pasar Besar Kota Batu menjadi kalah saing dengan ketertarikan pengunjung. Melihat hal yang demikian, modernisasi Pasar Besar Kota Batu akan mampu menambah jumlah pengunjung dan menarik perhatian wisatawan yang datang ke sana.

Modernisasi sarana dan prasana pasar merupakan tugas pokok dan fungsi dinas koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang di atur dalam Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2013. Modernisasi pasar besar Kota Batu merupakan kerjasama dengan pihak PT. Panglima Capital Iqoni untuk itu Walikota Batu membentuk Team Koordinasi Kerjasama Daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan salah satu anggota yang di tunjuk oleh pemerintah Kota Batu untuk menjadi salah satu anggota TTKSD.

Pembangunan Pasar Besar Kota Batu hampir sama dengan pembangunan Paar Besar di Dinoyo, namun pembangunan Pasar Besar Kota Batu ini mengalami masalah di dalam tahapan-tahapan pembangunannya. Pihak investor memberikan bantuan pendanaan kepada pemerintah, namun dalam pengelolaannya menggunakan jangka waktu tertentu. Pihak investor yang memberikan bantuan dana ini adalah PT. Panglima Capital Iqoni. Kerjasama dengan PT. Panglima ini menggunakan metode bangun serah guna. Metode bangun serah guna ini masih menguntungkan bagi pemerintah karena pemerintah masih mendapatkan masukan tanpa mengeluarkan anggaran dalam jumlah besar.

Peranan pemerintah dalam mengelola pasar sangatlah memiliki pengaruh terhadap keberhasilan serta kesejahteraan masyarakatnya, seperti yang ada di Korea. Hyung Ryel (2015:6), keberhasilan strategi perubahan Pasar Besar di Korea di dukung dengan kebijakan pemerintah atas dasar kebijakan dan laporan survei lainnya. Dukungan pemerintah untuk pembuatan proyek perbaikan fasilitas termasuk tempat parkir dan pusat-pusat informasi wisata. Dan dukungan pemerintah dengan bentuk perundang-undangan untuk pemeliharaan Pasar Besar guna mendorong maju Pasar Besar setempat dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah pembangunan di Kota Batu tidak sepenuhnya berjalan sesuai rencana. Menurut Muluk dkk (2015:5), Pasar Besar terhadap pasar modern di Indonesia belum dilakukan secara optimal, hal ini karena para pemangku kepentingan cenderung bertahan dengan kepentingan masing-masing. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menekankan pemberdayaan atau aktif keterlibatan pemangku kepentingan

dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat melihat pelaksanaan otonomi daerah adalah aturan dari alat (media) untuk pemerintah daerah/berwenang untuk mewujudkan kedaulatannya atas misi utama otonomi untuk mengembangkan lebih pedagang memberdayakan sebagai salah satu pemangku kepentingan.

Proses pembangunan Pasar besar dimonitoring oleh pemerintah daerah dan di evaluasi. Menurut Beni Pekei. And all (2014:11) Monitoring dan Evaluasi adalah pencapaian tujuan kinerja dengan rencana yang telah digunakan hanya untuk mengukur perspektif sosial dan perspektif proses bisnis internal. Dalam evaluasi program pembangunan pasar besar pemerintah memiliki peluang untuk mendukung keberhasilan modernisasi pasar besar.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dengan ini peneliti mengadakan penelitian dengan judul **“Peranan Pemerintah Daerah dalam Modernisasi Pasar Besar.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Peranan Pemerintah Daerah dalam Modernisasi Pasar Besar Kota Batu?
2. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi Peranan Pemerintah dalam Modernisasi Pasar Besar Kota Batu?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis Peranan Pemerintah Daerah dalam Modernisasi Pasar Besar
2. Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis Faktor yang Mempengaruhi Modernisasi Pasar Besar

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang terdapat di dalam kontribusi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
 - a) Sebagai sumbangan pemikiran serta wacana terkait Peranan Pemerintah Daerah dalam pengembangan sektor ekonomi.
 - b) Sebagai sumbangan bahan referensi bagi calon peneliti berikutnya yang memahami isu-isu tentang peranan pemerintah.
2. Manfaat Praktis
 - a) Memberikan masukan bagi instansi terkait dalam Peranan Pemerintah Daerah dalam Modernisasi Pasar Besar

E. Sistematika Pembahasan

Merupakan gambaran umum tentang konsep pemikiran yang digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan secara lebih sistematis. Pokok-pokok pembahasan tersebut secara umum adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini pembahasannya diawali dengan latar belakang, dimana dalam latar belakang membahas tentang Peranan Pemerintah Daerah dalam Modernisasi Pasar Besar. Dilanjutkan dengan rumusan masalah tentang Peranan Pemerintah Daerah dalam Modernisasi Pasar Besar dan faktor yang Mempengaruhi Modernisasi Pasar Besar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis Peranan Pemerintah Daerah dalam Modernisasi Pasar Besar serta mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis Faktor yang Mempengaruhi Modernisasi Pasar Besar. Adapun kontribusi penelitiannya adalah memberikan manfaat akademis dan manfaat praktis;

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka, menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Teori-teori yang digunakan antara lain yaitu administrasi publik yang terdiri dari pengertian administrasi, pengertian publik, pengertian administrasi publik, ruang lingkup administrasi publik, hubungan antar dimensi administrasi publik, dan kegiatan administrasi publik.

Teori yang kedua yaitu Pemeritnah Daerah, terdiri dari pengertian pemerintah daerah, fungsi pemerintah daerah, asas pemerintah daerah, karakteristik pemerintah daerah. Teori yang ketiga adalah Otonomi Daerah, yang terdiri dari, pengertian Otonomi Daerah, Prinsip Otonomi Daerah, Tujuan Otonomi Daerah. Teori yang Keempat adalah Peranan pemerintah, terdiri dari pengertian Peranan, pengertian pemerintah, dan pengertian peranan pemerintah. Teori yang kelima yaitu Modernisasi. Teori yang keenam yaitu pasar. Terdiri dari pengertian pasar, fungsi pasar, peran pasar. Teori yang terakhir yaitu kerjasama, baik pengertian, bentuk, prosedur, ruang lingkup yang dikerjasamakan dan kerjasama di antara daerah-daerah tingkat I.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini. Metode penelitian tersebut diantaranya adalah jenis penelitian. Skripsi ini menggunakan penelitian deskriptif dan pendekatan yang dipakai adalah dengan pendekatan kualitatif. Kedua adalah fokus penelitian yaitu tentang Peranan Pemerintah Daerah dalam Modernisasi Pasar Besar serta faktor yang mempengaruhi Modernisasi Pasar Besar. Sedangkan lokasi penelitian di Kota Batu dan situs penelitian adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu dan Pasar Besar Kota Batu. Sumbernya berasal dari informan, peristiwa, dan dokumen sedangkan jenis datanya yaitu ada data primer dan data sekunder. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data yang

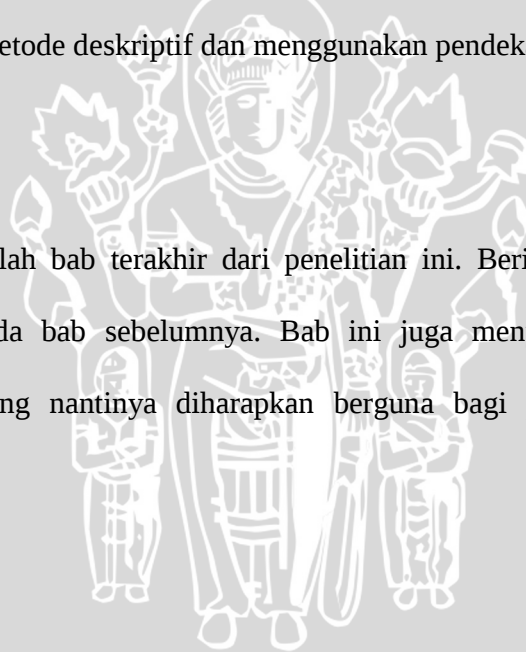
terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian ada instrumen penelitian, dan analisis data

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian serta pembahasannya. Tercantum pula penyajian data secara primer maupun sekunder di lapangan dengan menggunakan metode deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif

Bab V PENUTUP

Bab kelima adalah bab terakhir dari penelitian ini. Berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab sebelumnya. Bab ini juga menyajikan saran atau rekomendasi yang nantinya diharapkan berguna bagi peneliti dan objek penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi

Secara etimologis, administrasi berasal dari kata *ad* dan *ministrate* yang salah satunya berarti “melayani” dan menghasilkan (Syafiie, 2006:16). Berdasarkan pendapat Atmosudirdjo dalam Syafiie (2006:13), Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. Eksistensi daripada administrasi ini berkaitan dengan organisasi, artinya administrasi itu terdapat di dalam suatu organisasi. Menurut Gie dalam Syafiie (2006:14), Administrasi dalam arti luas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pengertian administrasi menurut Siagian dalam Syafiie (2006:14), yaitu keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Seiring dengan perkembangan zaman, diiringi dengan berkembangnya administrasi sebagai cabang ilmu tersendiri, yakni administrasi sebagai usaha, manajemen, proses sampai pada pemerintahan. Berikut ini adalah pengertian-pengertiannya menurut para ahli:

a. Administrasi sebagai usaha

Pengertian administrasi sebagai tata usaha atau catat mencatat sangat populer di Indonesia, pengertian tersebut juga administrasi dalam arti sempit (Indradi, 2006:02). Sedangkan menurut Soedjadi dalam Indradi (2006:03), Administrasi sebagai pekerjaan ketatausahaan dan kesekretarian yakni pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan surat menyurat atau korespondensi, soal pencatatan atau dokumentasi, soal pendaftaran atau registrasi, soal-soal kearsipan dan sebagainya. Selain itu, dalam pengertian yang sempit, administrasi dalam bahasa Indonesia “tata usaha”, yang dimaksud adalah aturan-aturan mengenai pelaksanaan tugas meliputi tiga bidang urusan yang bersifat umum dan penting yang terdapat di tiap-tiap kantor, instansi atau badan-badan, mengenai a) urusan umum; b) urusan keuangan; c) urusan kepegawaian. (Sosromidjojo dalam Indradi, 2006:03);

b. Administrasi sebagai seni atau kiat

Administrasi dapat dipandang sebagai seni atau kiat (art) sebab dalam praktiknya administrasi memerlukan kecakapan atau skill yang dapat dicapai melalui pelatihan didalamnya ada ruang untuk memakai pertimbangan pribadi (Indradi, 2006:05). Hal ini sesuai dengan Siagian dalam Indradi (2006:05), yakni administrasi itu selain sebagai artistic science juga sebagai scientific art;

c. Administrasi sebagai teknik dan keterampilan

Menurut Indradi (2006:06), administrasi sebagai teknik merupakan suatu cara atau metode yang lahir dari peniruan atau pengulangan seni administrasi ataupun melalui kejadian yang berulang yang terus menerus dilakukan. Selain itu, memandang administrasi sebagai suatu keterampilan berarti melihatnya sebagai suatu kecakapan yang dimiliki seseorang atau kelompok dalam menyelesaikan tugas-tugas administrasi;

d. Administrasi sebagai manajemen

Menurut Schultze dalam Indradi (2006:07), bahwa management dan administration kerap kali digunakan secara berpadanan, sehingga orang meragukan untuk membedakannya. Walaupun istilah manajemen biasanya lebih sering digunakan dalam peristilahan bisnis (privat) dan administrasi sering dipakai dalam bidang publik/negara, namun ada kecenderungan istilah manajemen juga diterapkan dalam bidang publik atau negara, salah satu contohnya adalah manajemen pemerintah (Indradi, 2006:08);

e. Administrasi sebagai proses atau kegiatan

Administrasi ini dapat diartikan dalam pengertian luas. Menurut Dwight Waldo dalam Indradi (2006:08), Administrasi adalah suatu daya upaya manusia yang kooperatif yang mempunyai tingkat rasionalitas tinggi. Sedangkan menurut Simon dalam Indradi (2006:09), dalam pengertian luas, Administrasi dapat didefinisikan

sebagai aktivitas kelompok (orang) yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu Nawawi dalam Indradi (2006:10), juga menambahkan bahwa Administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya;

f. Administrasi sebagai pemerintah

Wijana dalam Indradi (2006:11), mengungkapkan bahwa administrasi adalah rangkaian semua organ-organ negara rendah dan tinggi yang bertugas menjalankan pemerintahan, pelaksanaan dan kepolisian. Sedangkan menurut Atmosudirdjo dalam Indradi (2006:11), pengertian administrasi negara sebagai aparatur dari negara yang dikepalai dan digerakkan oleh pemerintah guna menyelenggarakan undang-undang, kebijaksanaan-kebijaksanaan dan kehendak-kehendak pemerintah.

2. Pengertian Publik

Menurut Syafiie (2006:17), istilah publik berasal dari bahasa Inggris *public* yang berarti umum, masyarakat atau negara. Dalam bahasa Indonesia, arti sebenarnya dari kata praja adalah rakyat, sehingga untuk pemerintah yang melayani keperluan seluruh rakyat diberi istilah pamong praja (pelayan rakyat). Sedangkan arti dari publik itu sendiri adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik

berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki (Syafiie, 2006:18). Sehingga dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa publik adalah segala sesuatu yang bersifat umum dan menyangkut tentang masyarakat maupun tentang negara.

3. Pengertian Administrasi Publik

Administrasi publik menurut Atmosudirdjo dalam Syafiie (2006:24), adalah administrasi dari negara sebagai organisasi, dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan. Berdasarkan pendapat Pfiffner dan Presthus dalam Syafiie (2006:23), Administrasi publik meliputi:

“Implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik. Administrasi publik dapat didefinisikan kordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah, dan secara global administrasi publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan, dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.”

Sedangkan pengertian administrasi publik menurut Nigro dalam Syafiie (2006:24), adalah sebagai berikut:

1. Administrasi publik adalah suatu kerja sama kelompok dalam lingkungan pemerintahan;
2. Administrasi publik meliputi ketiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta hubungan di antara mereka;
3. Administrasi publik mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik;
4. Administrasi publik sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat; dan
5. Administrasi publik dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perorangan.

Menurut Chandler dan Plano dalam Indradi (2006:113), administrasi publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Selain itu Wilson dalam Tjiptoherijanto (2010:111), administrasi publik adalah Proses operasionalisasi keputusan politik, dengan demikian memisahkan antara wilayah politik dengan wilayah administrasi.

Tjokroamidjyo dalam Tjiptoherijanto (2010:112), menjelaskan mengenai tiga fungsi utama administrasi publik, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Formulasi kebijakan: memiliki empat subfungsi, yakni fungsi analisis kebijakan, perkiraan masa depan untuk menyusun langkah-langkah alternatif, menyusun program/strategi dan pengambilan keputusan. Konsistensi formulasi kebijakan amat dibutuhkan dalam pencapaian tujuan masyarakat yang sejahtera. Konsistensi tersebut mencakup konsistensi antara waktu/generasi, antar sektor dan wilayah, antar tingkat pemerintahan dan antar unit pemerintahan;
- b. Pengaturan/pengendalian unsur-unsur administrasi: yang perlu dikelola ialah organisasi, keuangan, kepegawaian dan sarana-sarana lain. Tugas administrasi adalah mendapatkan, menggunakan, mengendalikan keempat elemen administrasi tersebut. Pengaturan/pengendalian unsur-unsur administrasi tidak lain adalah pengelolaan internal administrasi publik atau dapat juga dikatakan sebagai pengelolaan internal administrasi publik atau dapat juga dikatakan sebagai pengelolaan kapasitas administrasi publik;
- c. Penggunaan dinamika administrasi: meliputi kepemimpinan, koordinasi, pengawasan, dan komunikasi. Jika pengaturan/pengendalian unsur-unsur administrasi lebih menekankan pada aspek organisasi dari administrasi publik.

Dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

Fungsi pemerintahan menurut Ryass Rasyid dalam Ndraha (2005:58), yaitu pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development).

Menurut Sukidin dkk (2009:98), lembaga atau organisasi publik adalah lembaga yang diciptakan melalui hukum, dibiayai oleh negara, dan sifatnya merupakan pejabat-pejabat karier. Organisasi publik terwujud dalam pemerintah nasional, departemen, kementerian, pemerintah daerah dan korporasi publik. Pemerintah menggunakan administrasi untuk mencapai tujuan maksimalisasi kesejahteraan rakyat.

4. Ruang Lingkup Administrasi Publik

Harus diakui bahwa cakupan atau ruang lingkup administrasi publik sangat kompleks tergantung dari perkembangan kebutuhan atau dinamika masalah yang dihadapi masyarakat. Salah satu cara untuk melihat cakupan material atau ruang lingkup administrasi publik dari suatu negara adalah dengan mengamati jenis lembaga-lembaga departemen (kementerian) dan non departemen yang ada dalam suatu negara atau daerah. Chandler dan Plano (1988:3), mengatakan bahwa apabila kehidupan manusia menjadi semakin kompleks permasalahannya, maka apayang dikerjakan oleh pemerintah atau administrasi publik juga semakin kompleks.

Cakupan yang dinamis ini dapat dipelajari dari berbagai literaturkhususnya buku-buku teks administrasi publik.Asumsinya, bidang dan isu yang ditulis dalam buku-buku teks tersebut relatif kontemporer dan elementer untuk diperhatikan

baik oleh akademisi maupun praktisi administrasi publik. Beberapa buku teks terkemuka memberikan ruang lingkup sebagai berikut, yaitu Buku teks yang ditulis oleh Henry (1995), memberikan beberapa ruang lingkup yang dapat dilihat dari unsur-unsur (selain perkembangan ilmu administrasi publik itu sendiri) berikut:

- a. Organisasi publik, yang pada prinsipnya berkenaan dengan model-model organisasi, dan perilaku birokrasi
- b. Manajemen publik yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi pogram dan produksivitas, anggaran publik, dan manajemen sumberdaya manusia
- c. Implementasi yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasi, privatisasi, administrasi antar pemerintahan dan etika birokrasi.

5. Hubungan Antar Dimensi Administrasi Publik

Analogi mengenai administrasi publik sebagai tubuh manusia yang hidup dalam suatu lingkungan memang sangat tepat karena terdapat saling hubungan internal antara satu unsur dengan unsur lain seperti otak, jantung dan urat nadi, organ tubuh dan sistem sensor. Dalam konteks ini unsur-unsur tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungannya tetapi sebaliknya juga mempengaruhi lingkungannya. Hubungan antara lingkungan dengan kebijakan nampak dari kondisi dan situasi serta potensi lingkungan yang digunakan sebagai pertimbangan dalam proses pembuatan kebijakan publik, atau warna suatu kebijakan publik ditentukan oleh variasi dan dinamika masalah, kebutuhan, aspirasi, potensi, ancaman dan tantangan lingkungan. Sebaliknya hasil kebijakan dapat merubah lingkungan baik dalam arti positif (Keban, 2008:11).

Lingkungan juga dapat mewarnai struktur organisasi dan manajemen. Misalnya lingkungan masyarakat perkotaan yang relatif lebih maju akan mewarnai struktur birokrasi yang melibatkan masyarakat agar lebih berpartisipasi dalam perencanaan monitoring dan evaluasi. Sebaliknya lingkungan masyarakat perdesaan yang belum maju cenderung mengandakan birokrasi sehingga tidak terbentuk stuktur atau forum khusus, dan tidak melibatkan masyarakat dalam fungsi monitoring dan evaluasi berbagai kegiatan pelayanan (Keban, 2008:12).

Lingkungan juga dapat mewarnai moral dan etika. Semua norma dan nilai yang menjadi dasar pertimbangan moral dan etika berasal dari berbagai sumber yang terdapat di lingkungan seperti agama, budaya, kebiasaan dan tradisi masyarakat. Korupsi, konklusi dan nepotisme (KKN), misalnya mungkin dianggap wajar di kelompok masyarakat tertentu sehingga sulit untuk menghilangkan di tubuh birokrasi pemerintahan. Harus diakui juga bahwa lingkungan dapat mempengaruhi kinerja secara langsung tanpa melalui kebijakan, manajemen, struktur organisasi, moral dan etika, seperti masuknya kebiasaan dan tradisi masyarakat, perubahan gaya hidup, perubahan harga dan nilai tukar, bencana alam, dsb (Keban, 2008:13).

Saling berhubungannya antara dimensi kebijakan, manajemen, struktur organisasi dan moral dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Kebijakan yang nampak dari keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dapat dipengaruhi oleh moral atau niat baik para pejabat. Sebaliknya, moral yang jelek dapat muncul apabila ruang-ruang gerak atau peluang regulasi atau keputusan

(kebijakan) yang secara sengaja dibuat keras dan tegas atau kurang jelas (Keban, 2008:14).

Pengaruh stuktur organisasi dan manajemen terhadap kebijakan dapat dilihat dari kasus dimana keputusan untuk melakukan sesuatu pogram yang telah dirumuskan secara baik kemudian gagal terlaksana lantaran manajemen dan pengaturan struktur organisasi tidak berjalan dengan baik. Manajemen juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan. Apabila regulasi atau kebijakan tertulis tentang bagaimana manajemen pogram di lapangan diputuskan dengan pertimbangan yang kurang rasional atau kurang menggunakan perhitungan yang matang maka manajemen gagal.

6. Kegiatan Administrasi Publik

Apa yang dikerjakan di dalam dunia administrasi publik adalah yang dikerjakan pemerintah dengan jumlah dan jenis yang sangat banyak dan variatif, baik menyangkut pemberian pelayanan di berbagai bidang kehidupan (*public services*), maupun yang berkenaan dengan mengejar ketinggalan masyarakat lewat pogram-pogram pembangunan. Kegiatan pemberian pelayanan publik dapat diamati dari pelayanan rutin di bidang kesehatan, pendidikan, keamanan dan ketertiban, perijinan, dsb. Kegiatan yang berkenaan dengan pembangunan dapat diamati dari penyediaan barang-barang publik seperti pembangunan ekonomi (sarana fisik dan sosial), sistem sosial dan budaya, hukum, politik dan pembangunan kualitas manusia, yang semuanya diarahkan untuk mengejar

ketinggalan, pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan dan pengangguran (Keban, 2008:17).

Secara umum, kegiatan ini dapat dilihat dari apa yang secara formal dilakukan oleh lembaga departemen dan non departemen, sementara di daerah adalah yang dilakukan oleh sekretariat daerah, dinas, badan, dan kantor. Untuk melaksanakan tugas dalam bidang-bidang tersebut, dipekerjakan berbagai macam personel mulai dari penjaga malam sampai dokter ahli bedah di rumah sakit umum atau mulai dari pegawai tanpa bawahan sampai para manajer publik tingkat atas yang memiliki bawahan. Singkatnya, kegiatan administrasi publik adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh para pejabat struktural atau pemegang eselon yang memimpin suatu unit, maupun oleh pejabat non structural yang tidak memimpin suatu unit.

Kegiatan-kegiatan ini dapat ditangani sendiri oleh aparat pemerintah, atau melibatkan sektor swasta dan masyarakat. Apabila kegiatan kompleks sifatnya dan pemerintah kurang mampu melaksanakan kegiatannya, kegiatan tersebut dapat ditawarkan kepada sektor swasta dan masyarakat untuk menanganinya. Kegiatan-kegiatan ini ditangani khusus karena menyangkut nilai rasionalitas dan politis. Nilai rasionalitas dalam kegiatan ini menyangkut perhatian terhadap efisiensi, efektifitas dan keekonomian. Secara khusus administrasi publik difokuskan pada aspek manajemen sebagai pelaksanaan dari kebijakan publik. Artinya administrasi publik lebih berkenaan dengan kegiatan pengelolaan pelayanan publik dan administrasi publik yaitu the management of public affairs.

B. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Definisi Pemerintahan Daerah di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut:

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. daerah.

Koswara (2002 : 29) bahwa yang dimaksud pemerintahan adalah:

1. dalam arti luas meliputi seluruh kegiatan pemerintah, baik menyangkut bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif,
2. dalam arti sempit meliputi kegiatan pemerintah yang hanya menyangkut bidang eksekutif.

Selanjutnya Koswara (1999 : 5) menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan adalah Ilmu pengetahuan yang secara mandiri menyelenggarakan studi tentang cara-cara bagaimana pemerintahan negara disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun eksternal dalam upaya mencapai tujuan negara. Ilmu pemerintahan merupakan ilmu terapan karena mengutamakan segi penggunaan dalam praktek, yaitu dalam hal hubungan antara yang memerintah (penguasa) dengan yang diperintah (rakyat).

2. Fungsi Pemerintah Daerah

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah :

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

3. Asas Pemerintah Daerah

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, sangat bertalian erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara, yakni sebagai berikut:

- a. Asas sentralisasi

Asas sentralisasi adalah sistem pemerintahan dimana sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat.

b. Asas desentralisasi

Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

c. Asas dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertical wilayah tertentu.

d. Asas tugas pembantuan

4. Karakteristik Pemerintah Daerah

Karakteristik pemerintahan yang orientasinya kepada Anglo Saxon menurut Koswara (2003 : 3) lebih memperhatikan kemandirian masyarakat regional dan lokal, antara lain :

1. Partisipasi masyarakat yang luas dalam kegiatan pemerintahan,
2. Tanggung jawab sistem administrasi kepada badan legislatif,
3. Tanggung jawab pegawai peradilan biasa dan
4. Sifatnya lebih desentralistik.

Menurut Koswara (2003 : 3), karakteristik pemerintahan yang orientasinya kepada sistem kontinental, antara lain :

1. Pemusatan kekuasaan ditangan eksekutif,
2. Terdapat dominasi otorisasi nasional,

3. Profesionalisme aparat pemerintah,
4. Memisahkan secara psikologis dari rakyat biasa dan tanggungjawab pemerintah kepada Peradilan Administratif,
5. Kecenderungan sentralistik.

C.F Strong dalam Koswara (2003 : 247) memberikan makna pemerintahan sebagai berikut :

Pemerintahan menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai kewenangan yang dapat digunakan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara baik kedalam maupun keluar. Untuk melaksanakan kewenangan itu, pemerintah harus mempunyai kekuatan tertentu, antara lain kekuatan di bidang militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, kekuatan legislatif, atau pembuatan undang-undang serta kekuatan finansial atau kemampuan mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai keberadaan negara bagi penyelenggaraan peraturan. Semua kekuatan tersebut harus dilakukan dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.

Sementara itu Finer dalam Pamudji (1993 : 24-25) mengemukakan bahwa istilah “government” paling sedikit mempunyai 4 (empat) arti yaitu :

1. Menunjukkan kegiatan atau proses pemerintah, yaitu melaksanakan kontrol atas pihak lain (*the activity or the process of governing*).
2. Menunjukkan masalah-masalah (hal ikhwal) negara dalam mana kegiatan atau proses di atas dijumpai (*states of affairs*).
3. Menunjukkan orang-orang (pejabat-pejabat) yang dibebani tugas-tugas untuk memerintah (*people chargewidth the duty of governing*).

4. Menunjukkan cara, metode atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah (*the manner, method or system by which a particular society is governed*).

Pemerintahan dalam konteks penyelenggaraan negara menunjukkan adanya badan pemerintahan (*institutional*), kewenangan pemerintah (*authority*), cara memerintah (*technique to govern*), wilayah pemerintahan (*state, local, rural and urban*) dan sistem pemerintahan (*government system*) dalam menjalankan fungsi pemerintahannya.

Bayu Suryaningrat dalam Supriatna (2007 : 2) bahwa unsur yang menjadi ciri khas atau karakteristik mendasar perintah menunjukkan :

1. Adanya keharusan, menunjukkan kewajiban apa yang diperintahkan.
2. Adanya dua pihak, yaitu yang member perintah dan yang menerima perintah.
3. Adanya hubungan fungsional antar yang memberi dan menerima perintah,dan
4. Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah.

Sedangkan Rasyid dalam Supriatna (2007 : 2) mengatakan bahwa pemerintahan mengandung makna mengatur (UU), mengurus (mengelola) dan memerintah (memimpin) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bagi kepentingan rakyat.

Pemerintahan mengandung unsur yang secara filosofis berkaitan erat dengan :
Badan pemerintahan (pemerintah) yang sah secara kontitusional; Kewenangan untuk melaksanakan pemerintahan ; cara dan sistem pemerintahan ; Fungsi sesuai dengan kekuasaan pemerintahan, dan Wilayah pemerintahan.

Mengenai pembagian badan publik John Locke seperti yang dikutip Koswara (2005 : 21) mengemukakan pemisahan kekuasaan negara dalam tiga bidang yakni :

1. Kekuasaan dalam bidang legislatif, yaitu kekuasaan pembuatan Undang-Undang.
2. Kekekuasaan di bidang eksekutif, yaitu kekuasaan dalam melaksanakan Undang-undang.
3. Kekuasaan di bidang federatif, yaitu kekuasaan dalam melakukan hubungan luar negeri.

Kerangka pemikiran Locke kemudian lebih dikembangkan dan dipertegas lagi oleh Montesquieu. Dalam pemikirannya yang dikenal dengan konsep Trias Politika. Montesquieu dengan ajaran Trias Politika (Tripraja) yang dikenal dalam bukunya L'Esprit des Lois yang dikenal dengan dengan "Teori Pemisahan Kekuasaan" seperti dikutip Koswara (2001 : 1) membagi badan-badan kekuasaan dalam tiga lembaga, yaitu :

1. Pouvoir Legislatif, yaitu kekuasaan dalam bidang pembuatan perundang-undangan.

2. Pouvoir Eksekutif, yaitu kekuasaan dalam bidang melaksanakan segala sesuatu yang dimanatkan oleh undang-undang.
3. Pouvoir Yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menjaga agar undang-undang tersebut dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan.

Mengenai pembagian badan publik John Locke seperti yang dikutip Koswara (2005 : 21) mengemukakan pemisahan kekuasaan negara dalam tiga bidang yakni :

1. Kekuasaan dalam bidang legislatif, yaitu kekuasaan pembuatan Undang-Undang.
2. Kekekuasaan di bidang eksekutif, yaitu kekuasaan dalam melaksanakan Undang-undang.
3. Kekuasaan di bidang federatif, yaitu kekuasaan dalam melakukan hubungan luar negeri.

Konsep kedaulatan rakyat merupakan buah pemikirannya yang ia tuangkan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan negara absolut dan dominan tanpa ada kekuatan lain sebagai penyeimbang. Locke juga dikenal sebagai peletak dasar sistem demokrasi dengan menggagas kontrak sosial sebagai sebuah pola untuk memberikan legitimasi pada negara berdasarkan hukum alam (konsep alamiah).

Menurut Locke, sebuah negara dibangun atas dasar kesepakatan antara pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Hal ini menjadi pijakan dasar dari teori kontrak sosial.

Locke dengan tegas berpegang bahwa hak-hak dan kewajiban-kewajiban moral adalah intrinsik dan lebih dulu ada daripada hukum; pemerintah berkewajiban untuk memberi sanksi pada hukum-hukumnya terhadap apa yang secara moral dan alamiah adalah benar. Kedua, individu tidak menyerahkan kepada komunitas tersebut hak-hak alamiahnya yang substantial, tetapi hanya untuk melaksanakan hukum alam, bahwa tiap orang mempunyai hak menurut hukum alam atas sesuatu di mana dia telah mempergunakan tenaga untuk memperolehnya, seperti misalnya menutup dan mengerjakan tanah. Ketiga, hak yang diserahkan oleh individu tidak diberikan kepada orang atau kelompok tertentu tetapi kepada seluruh komunitas.

C. Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (2008 : 992), otonomi adalah pola pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, definisi otonomi daerah sebagai berikut : “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya

sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku. (Hanif Nurcholis,2007:30).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut :
“Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik .

2. Prinsip-Prinsip Pemberian Otonomi Daerah

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat (HAW. Widjaja, 2007 : 133).

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah. (HAW. Widjaja, 2007 : 7-8). Dengan demikian prinsip otonomi daerah adalah sebagai berikut :

a. Prinsip Otonomi Luas

Yang dimaksud otonomi luas adalah kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Di samping itu, daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

b. Prinsip Otonomi Nyata

Yang dimaksud prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing.

c. Prinsip Otonomi Yang Bertanggungjawab

Yang dimaksud dengan prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Rozali Abdullah, 2007 : 5). Setiap pemerintah daerah harus menjalankan otonomi daerah dengan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab agar tujuan otonomi daerah dapat terwujud yaitu

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan masyarakat.

3. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah menurut Mardiasmo (2002 : 46) adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu : (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Menurut Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin (2004 : 32), tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dengan demikian pada intinya tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

D. Peran Pemerintah

1. Pengertian Peranan

Peranan merupakan istilah yang sering digunakan dalam administrasi publik, seperti halnya dalam proses kegiatan pemerintahan Indonesia. Menurut Poerwodarminto (2005:854), Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam peristiwa, dan kata peran mempunyai arti seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, sedangkan peranan diartikan sebagai bagian dari tugas yang harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Soekanto (1990:208), Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, karena kedudukannya melakukan sesuatu tindakan atau gerak perubahan yang dinamis yang mana dari usahanya itu diharapkan akan tercipta suatu keadaan atau hasil yang diinginkan. Tindakan tersebut dijalankan dengan memanfaatkan kewenangan, kekuasaan, serta fasilitas yang dimiliki karena kedudukannya.

Dari pengertian tentang peranan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan peranan adalah tugas yang dilaksanakan dengan memanfaatkan kewenangan, kedudukan dan fasilitas agar tercipta tujuan yang diinginkan. Peranan sangat erat kaitannya dengan pemerintahan. Peranan sangat penting dalam administrasi public karena peranan menyangkut tata cara dalam pengambilan keputusan.

2. Pengertian Pemerintah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, Pemerintah dibagi menjadi dua yaitu pemerintah pusat dan pemerintah Daerah. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Serta terdapat pula urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Sedangkan pengertian dari pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Peranan Pemerintah

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, pemerintah memiliki fungsi dan peran tertentu. Menurut Kaufman dalam Thoha (1995:101), Fungsi

pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.

Menurut Rasyid (2000:13), mengemukakan 6 tugas umum pemerintah antara lain yaitu:

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan;
2. Memelihara ketertiban dan menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai;
3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat;
4. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
5. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas;
6. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan.

Dari penjelasan-penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Siagian (2014:142), peran pemerintah dalam pembangunan nasional dilihat dari 5 wujud utama antara lain yaitu:

1. Selaku stabilisator, salah satu peran yang sangat penting yang harus dimainkan oleh pemerintah secara efektif ialah peran selaku stabilisator. Peran pemerintah selaku stabilisator yaitu dalam mewujudkan perubahan tidak berubah jadi gejolak sosial, apalagi yang dapat merupakan ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara yaitu a) kemampuan selektif

- yang tinggi; b) proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif; c) melalui pendidikan; d) pendekatan yang persuasif, dan e) pendekatan bertahap tetapi berkesinambungan.
2. Selaku Inovator, inovasi merupakan salah satu “produk” dari kreativitas. Ditinjau dari segi administrasi pembangunan, inovasi berarti temuan baru, metode baru, sistem baru, dan yang terpenting cara berpikir yang baru. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya, pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (legitimacy) yang tinggi. Dengan demikian bahwa sistem, prosedur, dan metode kerja, serta pendekatan yang diperlukan adalah yang bersifat problem-solving dan action-oriented.
 3. Selaku Modernisator, melalui pembangunan setiap negara ingin menjadi modern, berbagai implikasi tersebut antara lain ialah kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain (memperoleh pengakuan de jure). Untuk mewujudkannya diperlukan pembangunan yang sistematis, programatis, dan berkelanjutan. Pemerintahlah yang bertugas untuk “menggiring” masyarakat ke arah kehidupan modern seperti itu. Proses modernisasi harus terjadi di lingkungan birokrasi pemerintah sendiri.
 4. Selaku Pelopor, bahwa aparatur pemerintah harus menjadi panutan (role model) bagi seluruh masyarakat. Pentingnya peranan tersebut dimainkan secara efektif karena dengan kepeloporan tersebut warga negara akan lebih mudah merubah pandangannya, persepsi, cara berpikir, cara bertindak, dan cara bekerjanya yang pada gilirannya pasti akan memperlancar jalannya roda pembangunan nasional.
 5. Selaku Pelaksana Sendiri, bahwa sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus diselenggarakan sendiri oleh pemerintah. Pemerintah masih dituntut untuk memainkan peranan selaku pelaksana sendiri berbagai kegiatan meskipun diharapkan bahwa makin maju suatu masyarakat makin berkurang pula intensitas peranan tersebut.

Peran yang harus dilakukan oleh pemerintah sangatlah penting. Oleh karena itu, pemerintah harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Hal ini agar terwujudnya pembangunan nasional yang berdampak padakejahteraan masyarakat.

E. Modernisasi

1. Pengertian Modernisasi

Modernisasi menurut riggs. Adalah proses menandingi ciri dari suatu kebudayaan “superior” lain. Dalam arti kata ini *hellenisasi* dan *sinicsasi* merupakan bentuk-bentuk kuno meodernisasi, sedangkan westernisasi dengan komponen-komponennya yang terdiri dari industrialisasi demokrasi, dan ekonomi pasar. Merupakan jenis modernisasi yang lazim ditemukan pada abad kedua puluh. Modernisasi merupakan suatu jenis perubahan social sejak abad delapan belas. Yang terdiri dari kemajuan suatu masyarakat perintis di bidang ekonomi dan politik dan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari di masyarakat-masyarakat pengikut. Pada abad kesembilan belas masih memungkinkan membuat rumusan ini menjadi lebih tegas lagi dengan menunjuk kepada inggris dan perancis sebagai negara-negara maju dan semua Negara lainnya seperti Negeria Belanda, Jerman dan Amerika Serikat, semenjak itu proses tersebut telah bercabang banyak, oleh karena itu masyarakat pengikut dari masa lampau seperti rusia dan cina, sekarang sudah menjadi masyarakat-masyarakat maju, yang pada gilirannya di ambil sebagai model oleh Negara-negara satelit di eropa timur, umpamanya atau oleh sejumlah masyarakat di Afrika dan Asia yang memperoleh kemerdekaan semenjak perang dunia kedua. Mengenai setiap Negara yang telah memainkan peranan perintis bagi suatu masyarakat pengikut. Adalah pada tempatnya untuk mengkombinasikan prespektid structural dengan prespektif yang dipusatkan kepada perubahan-perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor luar pada suatu waktu sebelumnya. Meskipun berhasilnya suatu modernisasi

tekanan pada dimensi kedua ini dapat menjadi kurang menonjol dibandingkan dengan sebelumnya. Dengan perkataan lain setiap masyarakat pengikut selama ia berada dalam kategori itu menghadapi masalah yang menghubungkan struktur yang diturunkan lewat sejarah dan ketegangan-ketegangan yang khas (termasuk dorongan hati untuk melakukan modernisasi)

Modernisasi berbeda dengan revitalisasi, revitalisasi merupakan perubahan yang vital dari kondisi sebelumnya yang mengalami kematian menjadi seperti keadaan semula. Namun modernisasi adalah dimana kondisi suatu keadaan masih berjalan dengan normal atau baik, dilakukan perubahan yang berpotensi untuk perkembangan suatu keadaan.

2. Aspek Proses Modernisasi

Menurut Willard a belling dan George O Totten (1970:13) ada empat aspek proses modernisasi:

1. Berbagai pertimbangan menunjukkan bahwa sejak abad ke delapan-belas suasana ekstern dari masyarakat-masyarakat dan terutama jurang perbedaan yang ditimbulkan oleh industrialisasi awal di Negara inggris dan demokrasi awal di perancis, telah memberikan arti istimewa kepada tingkat keterbelakangan, yakni sebagai satu hambatan dan satu tantangan bagi modernisasi.
2. Dalam usaha meraka. Masyarakat-masyarakat pengikut secara khas mencari substansi bagi faktor-faktor yang telah merupakan syarat-syarat

bagi perkembangan din Negara-negara maju. Di dalam batas-batas yang ditetapkan oleh alam dan sejarah.

3. Suasana yang sama dihadapi masyarakat-masyarakat pengikut, pada gilirannya memberikan arti penting yang khusus kepada pemerintah. Satu kekhasan adalah bahwa pemerintah-pemerintah berusaha memainkan peranan penting dalam modernisasi masyarakat dan bersamaan dengan itu mereka juga berusaha mengatasi sumber-sumber ketidak setabilan mereka sendiri yang timbul dari ketegangan ketegangan khusus yang diciptakan oleh keterbelakangan.
4. Pembagian dunia ke dalam masyarakat-masyarakat maju dan masyarakat pengikut, disertai komunikasi yang relatif lancar. Mengakibatkan dihargainya pendidikan sebagai alat modernisasi yang lebih mudah tersedia dibandingkan dengan modal yang diperlukan untuk teknologi modern. Pendidikan dan komunikasi modern juga dapat mendorong berkembangnya golongan *interlegensia* dan produk kebudayaan yang sebagaimana telah dikemukakan oleh Wilhelm Riehl dalam tahun 1980 melebihi apa yang dapat dipergunakan atau dibayar oleh Negara. Fenomena yang terjadi berulang-ulang itu tercermin dalam bermunculannya banyak usaha untuk menanggulangi keterbelakangan negara melalui upaya-upaya untuk menyesuaikan kekuatan yang diperlihatkan oleh masyarakat maju dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi-tradisi pribumi.

3. Proses modernisasi

Proses modernisasi memerlukan suatu perangkat prasyarat yang saling mempengaruhi. Dengan pertumbuhan ekonomi, masyarakat yang bersangkutan mengalami diferensiasi struktural yang semakin meningkat. Koordinasi peranan menjadi persoalan. Maka timbulah kebutuhan dalam masyarakat untuk mempelajari kembali serta mengadakan penyesuaian kembali peranan-peranan baru yang timbul dalam masyarakat. Akhirnya, demokrasi sebagai distribusi kekuasaan yang lebih egaliter, membutuhkan partisipasi masyarakat serta waktu kesadaran identifikasi dengan sistem politik.

4. Krisis yang Ditimbulkan

Menurut riggs tidak merupakan faktor-faktor negative, melainkan bahkan menjadi perangsang pembangunan. Maka menaruhlah perhatian kepada kekuatan-kekuatan yang mendorong perubahan dan pola-pola perubahan yang mempengaruhi sistem-sistem politik.

F. Pasar

1. Pengertian Pasar

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Pasar secara harfiah berarti berkumpul untuk tukar menukar barang atau jual beli sekali dalam 5 hari Jawa. Pasar dalam konsep urban jawa adalah kejadian yang berulang secara ritmik

dimana transaksi sendiri tidak sentral, yang sentral dalam kegiatan pasaran adalah interaksi sosial dan ekonomi dalam satu peristiwa, Berkumpul dalam arti saling bertemu muka dan berjual beli pada hari pasaran menjadi semacam panggilan sosial periodik, Kata lain dari pasar adalah *peken* yang kata kerjanya *mapeken* artinya berkumpul (Wiryomartono, 1995).

Pasar mempunyai kaitan yang sangat erat dengan kegiatan ekonomi masyarakat, baik produksi, distribusi maupun konsumsi. Dalam hal ini pasar dapat diartikan sebagai arena distribusi atau pertukaran barang, di mana kepentingan produsen dan konsumen bertemu dan pada gilirannya menentukan kelangsungan kegiatan ekonomi masyarakatnya. Ginanjar (1980), berpendapat bahwa pasar adalah tempat untuk menjual dan memasarkan barang atau sebagai bentuk penampungan aktivitas perdagangan. Pada mulanya pasar merupakan perputaran dan pertemuan antar persediaan dan penawaran barang dan jasa.

2. Fungsi Pasar

Pasar yang sebagai pusat jual beli antara penjual dan pembeli memiliki fungsi yang sangat penting di dalam kegiatan ekonomi. Adapun fungsi pasar menurut kegiatannya adalah:

a. Fungsi Distribusi

Maksudnya adalah fungsi mendekatkan jarak antara konsumen dengan produsen dalam melaksanakan fungsi transaksi. Pasar memiliki fungsi distribusi menyaurkan barang-barang hasil produksi asli daerahnya maupun luar daerah kepada konsumen

b. Fungsi Pembentukan Harga

Maksudnya adalah fungsi dimana sebelum terjadi transaksi jual beli terlebih dahulu di lakukan proses tawar menawar, sehingga diperoleh kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Di dalam proses tawar menawar antara penjual dan pembeli memiliki kesepakatan harga atau yang disebut harga pasar

c. Fungsi Promosi

Maksudnya adalah fungsi pasar sebagai tempat yang paling tepat untuk ajang promosi karena di pasar banyak di kunjungi para pembeli, pelaksanaan promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya memasang spanduk, atau membagikan stiker dan brosur kepada pengunjung pasar.

Pasar berfungsi sebagai tempat atau wadah untuk pelayanan masyarakat. Hal ini dilihat dari berbagai segi atau bidang di antaranya:

a. Segi Ekonomi

Merupakan tempat transaksi antara produsen dan konsumen yang merupakan komoditas untuk mawadahi kebutuhan sebagai demand dan suplai;

b. Segi Sosial Budaya

Merupakan kontak sosial secara langsung menjadi tradisi suatu masyarakat yang merupakan interaksi antara komunitas;

c. Arsitektur

Menunjukkan ciri khas daerah yang menampilkan bentuk-bentuk fisik bangunan dan artefak yang dimiliki.

3. Jenis Pasar

a. Pasar Tradisional

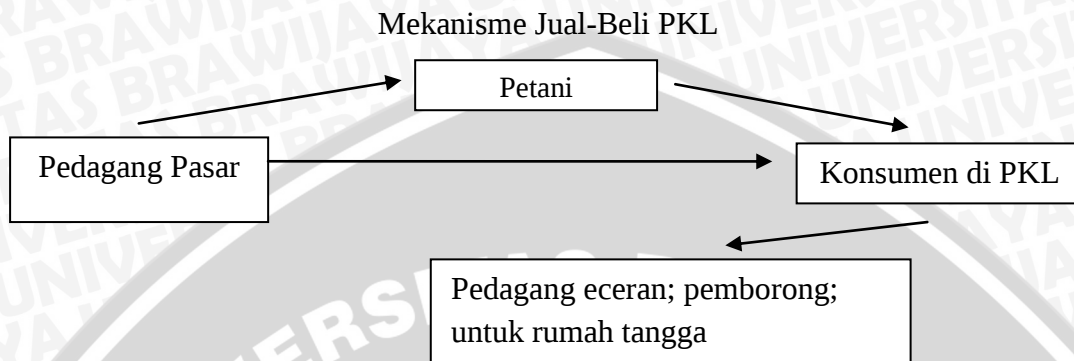
Merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung, bangunannya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka penjual maupun suatu pengelola pasar. Pada pasar tradisional ini sebagian besar menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, barang elektronik, jasa, dll. Selain itu juga menjual kue tradisional dan makanan nusantara lainnya.

Sejak berabad-abad yang lampau hubungan dagang sudah dikenal oleh masyarakat kita, baik itu melalui jalan darat, jalan sungai, maupun laut. Pada awalnya pasar dikenal sistem barter, misalnya hasil lading atau hasil hutan bertukar dengan hasil kerajinan keramik dan peralatan lainnya. Di dalam pasar tradisional terdapat klarifikasi tempat berjualan, klarifikasi jualan dan klarifikasi pedagang. Di pasar tradisional ada pedagang yang menempati kios atau stand, pedagang yang menempati los, dan pedagang yang menempati lesehan. Klasifikasi jenis jualan yaitu jualan emas, sembako, elektronik, pakaian, kain, jualan makanana. Sedangkan klasifikasi pedagang terdiri dari pedagang grosir, pedagang eceran dan bakul.

Transaksi yang biasanya terjadi di dalam pasar tradisional berlangsung secara sederhana, yaitu tawar menawar tidak ada sistem borongan tapi eceran, karena pada umumnya jumlahnya relatif kecil. Sebagian pedagang atau bakul di pasar adalah wanita, pedagang kecil ini menggelar dagangannya begitu saja di atas selembur kain lusuh, bagor, bekas karung pupuk, atau bahkan tanpa alas. Hal seperti ini biasa dilakukan oleh pedagang sayuran.

Pasar tradisional juga terdapat pedagang yang membeli dagangan atau kulakan sayuran, untuk dijual lagi dengan berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, atau dari rumah ke rumah dalam satu lingkungan. Namun ada juga pedagang kaki lima (PKL) yang sering disebut pasar wutah atau tumpah yang keberadaan mereka ini biasanya menempati badan-badan jalan, di depan pertokoan. Kegiatan jual-beli di pasar tradisional (termasuk PKL) adalah mekanisme tawar menawar secara langsung. Berlangsungnya tawar menawar untuk memperoleh kesepakatan harga diantara penjual dan pembeli yang berlangsung secara santai, tanpa tekanan dan demokratis. Pemberli dapat membeli dengan jumlah yang sedikit atau eceran dengan harga sama kalau dengan membeli jumlah banyak. Kesepakatan harga diperoleh bila si penjual telah mendapatkan keuntungan dan pembeli telah menganggap itulah harga termurah yang di dapatkan. Memang secara sosiologis pasar

merupakan institusi sosial yang diatur dengan jumlah norma dan sanksi yang dibentuk melalui interaksi sosial (Nurwanti 2006).



Gambar 2.1 Mekanisme Jual-Beli di Pasar Tradisional

Sumber : Steiner, Kebijakan dan Strategi Manajemen, 1988

b. Pasar Modern

Merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dan ditandai dengan adanya transaksi jual beli secara tidak langsung. Pembeli melayani kebutuhannya sendiri dengan mengambil di rak-rak yang sudah ditata sebelumnya. Harga barang sudah tercantum pada tabel-tabel yang pada rak-rak tempat barang tersebut diletakan dan merupakan harga pasti tidak dapat ditawar. Pasar modern dari segi bangunannya terlihat megah, representatif, bersih, ber-AC, dilengkapi fasilitas-fasilitas yang memadai dan memberikan rasa nyaman, puas aman kepada para pengunjung. Pasar modern bentuknya berupa Hypermart, Mall, swalayan, Plaza, Pasar Swalayan. Pasar modern ini untuk saat sekarang sedang mewabah di seluruh pelosok Indonesia.

Ciri khas pasar modern adalah memberikan keleluasaan untuk berbelanja, pengemasan yang menarik para konsumen, harga bersaing akan merangsang konsumen berbelanja di pasar modern yang akan disemati dengan one stop shopping yang telah menjadi kepercayaan simbol hidup masa kini. Hypermart telah menjadi gaya trend terbaru, simbol globalisasi dan kemoderenan. Di pasar modern pengunjung tinggal pilih barang yang secara terklarifikasi sudah tersedia di tempat-tempat yang mudah terlihat dan mudah dijangkau, tinggal memilih sesuai barang yang diinginkan dengan langsung melihat harganya. Pembeli tidak perlu tawar menawar atau memilih barang yang akan akan dibeli sampai berkali-kali, karena barang yang dijual dijamin kualitasnya. Di pasar modern pembeli sudah mematuhi harga yang sudah dilabel pada barang jualannya.

4. Peranan Pasar

Pasar terus berkembang perannya sebagai akibat berkembangnya fungsi pasar. Berdasarkan pada pengertian-pengertian mengenai pasar dan dengan berkembangnya ragam kegiatan yang terjadi, maka pasarpun mempunyai peranan yang beragam. Dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 378/KPTS/1987 tentang Pengesahan 33 Standar Bangunan Indonesia, peranan pasar dijabarkan sebagai berikut:

1. Pasar sebagai tempat pemenuhan kebutuhan

Pasar menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari yaitu sandang dan pangan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa di dalam pasar dapat ditemukan kebutuhan pokok sehari-hari atau kebutuhan pada waktu-waktu tertentu;

2. Pasar sebagai tempat rekreasi

Pasar menyediakan beraneka ragam kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan untuk waktu yang akan datang. Barang-barang tersebut ditata dan disajikan sedemikian rupa sehingga menarik perhatian pengunjung. Orang-orang yang datang ke pasar kadang-kadang hanya sekedar berjalan-jalan sambil melihat-lihat barang dagangan untuk melepaskan ketegangan atau mengurangi kejenuhan;

3. Pasar sebagai sumber pendapatan daerah/kota

Kegiatan pasar akan mengakibatkan terjadinya perputaran uang. Dari besarnya penarikan retribusi akan menambah pendapatan daerah. Besarnya penarikan retribusi akan tergantung pada kondisi pasar, skala pelayanan dan pengelolaan pasar;

4. Pasar sebagai tempat pencaharian atau kesempatan kerja

Berdagang juga merupakan pelayanan jasa, sehingga dalam kegiatan pasar, tidak lagi sekedar tempat jual beli, tetapi juga tempat kerja;

5. Pasar sebagai tempat komunikasi sosial

Bentuk jual beli, antara pedagang dan pembeli terjadi dengan kontak langsung, sehingga dalam proses jual beli terjadi komunikasi, terjadi

interaksi sosial. Pada pasar-pasar tradisional yang sifat kemasyarakatannya masih menampakkan sifat kerukunan, paguyuban, orang datang ke pasar, kadang-kadang hanya untuk mengobrol, mengikat kerukunan yang telah ada dan menyambung hubungan bathin. Paguyuban ini nampak akrab karena pembeli (pengunjung) yang datang tidak dibedakan status sosial atau profesi;

6. Pasar sebagai tempat studi dan latihan

Untuk mengetahui seluk beluk kondisi pasar dan perkembangan pasar, maka pasar dapat dipakai sebagai tempat studi dan pendidikan. Dari pasar dapat diketahui tingkat kebutuhan suatu daerah/kota, tingkat pendapatan, tingkat pelayanan, pola hubungan antar pasar dengan komponen pelayanan lain.

G. Kerjasama

1. Pengertian Kerjasama

Kerjasama merupakan kegiatan bersama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Kerjasama kemudian berkembang dengan munculnya pengertian-pengertian baru yang lebih kontemporer sesuai dengan pergerakan zaman. Kerjasama pada masa lalu identik dalam usaha perdagangan, pada masa sekarang kerjasama menyentuh semua bidang. Baik ekonomi, sosial, maupun politik. Pamudji (1985:12-13), menyebutkan Kerjasama adalah:

pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam pengertian itu terkandung tiga unsur pokok yang melekat pada suatu kerangka kerjasama, yaitu unsur dua pihak atau lebih, unsur

interaksi dan unsur tujuan bersama. Jika satu unsur tersebut tidak termuat dalam satu obyek yang dikaji, dapat dianggap bahwa pada obyek itu tidak terdapat kerjasama. Unsur dua pihak, selalu menggambarkan suatu himpunan yang satu sama lain saling mempengaruhi sehingga interaksi untuk mewujudkan tujuan bersama penting dilakukan. Apabila hubungan atau interaksi itu tidak ditujukan pada terpenuhinya kepentingan masing-masing pihak, maka hubungan yang dimaksud bukanlah suatu kerjasama. Suatu interaksi meskipun bersifat dinamis, tidak selalu berarti kerjasama. Suatu interaksi yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses interaksi, juga bukan suatu kerjasama. Kerjasama senantiasa menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi pada posisi yang seimbang, serasi dan selaras

Menurut Tangkilisan (2005:86), Kerjasama yaitu semua kekuatan yang timbul di luar batas-batas organisasi dapat mempengaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi. Karenanya perlu diadakan kerjasama dengan kekuatan yang diperkirakan mungkin akan timbul. Kerjasama tersebut dapat didasarkan atas hak, kewajiban dan tanggungjawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan.

Kerjasama dapat dilakukan dengan beberapa bentuk perjanjian dan pengaturan. Hal ini dijelaskan oleh Rosen dalam Keban (2007:33), bahwa bentuk perjanjian (forms of agreement) dibedakan atas:

1. Handshake Agreements, yaitu pengaturan kerja yang tidak didasarkan atas perjanjian tertulis.
2. Written Agreements, yaitu pengaturan kerjasama yang didasarkan atas perjanjian tertulis.

Sedangkan pengaturan kerjasama terdiri atas beberapa bentuk yaitu:

1. Consortia, yaitu pengaturan kerjasama dalam sharing sumberdaya, karena lebih mahal jika ditanggung sendiri-sendiri.

2. Joint Purchasing, yaitu pengaturan kerjasama dalam melakukan pembelian barang agar dapat menekan biaya karena skala pembelian lebih besar.
3. Equipment Sharing, yaitu pengaturan kerjasama dalam sharing peralatan yang mahal, atau yang tidak setiap hari digunakan.
4. Cooperative Construction, yaitu pengaturan kerjasama dalam mendirikan bangunan.
5. Joint services, yaitu pengaturan kerjasama dalam memberikan pelayanan publik.
6. Contract Services, yaitu pengaturan kerjasama dimana pihak yang satu mengkontrak pihak lain untuk memberikan pelayanan tertentu.
7. Pengaturan lainnya; yaitu pengaturan kerjasama lain dapat dilakukan selama dapat menekan biaya, misalnya membuat pusat pendidikan dan pelatihan

Bowo dan Andy (2007:50-51), menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama harus tercapai keuntungan bersama:

Pelaksanaan kerjasama hanya dapat tercapai apabila diperoleh manfaat bersama bagi semua pihak yang terlibat didalamnya (win-win). Apabila satu pihak dirugikan dalam proses kerjasama, maka kerjasama tidak lagi terpenuhi. Dalam upaya mencapai keuntungan atau manfaat bersama dari kerjasama, perlu komunikasi yang baik antara semua pihak dan pemahaman sama terhadap tujuan bersama. Kerjasama pada hakikatnya mengidentifikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi atau menjalin hubungan yang bersifat dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Disini terlihat adanya tiga unsur pokok yang selalu melekat pada kerangka kerjasama yaitu unsur:

1. Unsur dua pihak atau lebih,
2. Unsur tujuan bersama dan,
3. Unsur interaksi.

Jika salah satu tidak termuat dalam pada suatu obyek yang dikaji, maka dapat dikatakan bahwa pada obyek tersebut tidak terdapat kerjasama.

Unsur dua pihak atau lebih biasanya menggambarkan suatu himpunan dari kepentingan-kepentingan yang satu sama lain saling mempengaruhi, sehingga berinteraksi untuk mewujudkan suatu tujuan bersama. Jika hubungan atau interaksi itu tidak di tunjukan pada terpenuhinya kepentingan masing-masing

pihak (kepentingan bersama) maka hubungan yang dimaksud bukanlah suatu kerjasama. Disini terlihat bahwa suatu interaksi yang ditunjukkan untuk memenuhi kepentingan salah satu pihak tetapi tidak merugikan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses interaksi itu, juga bukan suatu kerjasama. Kerjasama senantiasa menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi itu pada posisi yang seimbang, serasi dan selaras.

2. Bentuk Kerjasama antar Daerah

Kerjasama antar daerah yang pada pokoknya menunjukkan adanya usaha bersama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, dapat mengambil berbagai bentuk. Kerjasama antar daerah dapat dilakukan oleh dua daerah saja atau oleh tiga daerah atau lebih dapat pula dilakukan oleh sesama Daerah Tingkat I, atau oleh sesama Daerah Tingkat II dalam satu lingkungan Daerah Tingkat I atau oleh sesama Daerah tingkat II tidak dalam satu lingkungan Daerah Tingkat I.

a. Kerjasama Bilateral

Suatu kerjasama yang hanya melibatkan dua pihak, misalnya antara dua Daerah Tingkat II dalam satu Daerah Tingkat I atau antara dua Daerah tingkat I merupakan kerjasama bilateral. Pada dasarnya kerjasama bilateral dapat lebih mudah diwujudkan oleh dua daerah yang bertetangga, walaupun kemungkinan bagi kerjasamayang serupa diantara daerah-daerah satu sama lain berjauhan juga dapat diwujudkan.

b. Kerjasama Multilateral

Kerjasama antar Daerah yang dilakukan oleh tiga daerah atau lebih untuk mengatur secara bersama-sama kepentingan daerah-daerah yang bersangkutan dapat disebut kerjasama multilateral. Daerah-daerah yang melakukan kerjasama dapat berada dalam satu wilayah Propinsi Daerah Tingkat I, atau terdiri atas beberapa Daerah Tingkat I. Dalam rangka kerjasama multilateral ini terdapat beberapa bidang kegiatan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, namun masing-masing membawakan fungsi dan peranan yang seimbang untuk mewujudkan suatu tujuan bersama. Contoh bidang kegiatan kerjasama multilateral antara lain Kerjasama multilateral yang berkenaan dengan daerah aliran sungai (DAS), kerjasama multilateral dalam pengembangan wilayah, Kerjasama multilateral dalam bidang pangan.

3. Prosedur Kerjasama

Kerjasama antara daerah merupakan suatu kerangka kerjasama antara dua atau lebih Pemerintah Daerah yang setingkat di dalam menangani suatu atau beberapa obyek tertentu demi tercapainya kepentingan masing-masing pihak. Oleh karena kerjasama ini merupakan kerjasama yang bersifat formal, maka prosedur penetapannya ke dalam suatu persetujuan kerjasama harus dilakukan di atas kerangka Peraturan Bersama (Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/1975). Sebelum ditetapkan peraturan bersama itu, tentu saja telah berlangsung beberapa kegiatan, baik yang berupa pengkajian bersama atas

usul-usul yang diajukan oleh masing-masing pihak, maupun berupa perundingan-perundingan untuk mencapai prinsip-prinsip dari kerangka kerjasama yang disepakati. Prosedur kerjasama itu dapat kita tinjau dari dua ruang lingkup dan tingkatan kerjasama, yaitu kerjasama antara daerah-daerah Tingkat II dalam satu Propinsi atau bersama di antara daerah-daerah tingkat I.

Kerjasama di antara daerah-daerah Tingkat II dalam satu Propinsi:

- a. Pada tingkat awal, gagasan tentang kerjasama itu dicetuskan oleh salah satu pihak yang merasa berkepentingan, kemudian menggarapnya dalam lingkungan pengambil keputusan di daerah yang bersangkutan (misalnya antara Bupati beserta staf dengan pimpinan DPRD tingkat II yang bersangkutan);
- b. Tahap kedua adalah prakarsa untuk melakukan kontak-kontak dengan Daerah Tingkat II yang akan diajak bekerjasama. Seiring dengan itu dilakukan kontak-kontak yang serupa terhadap staf Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan sebagai pihak yang berwenang mengesahkan kerjasama itu;
- c. Setelah prinsip-prinsip dari kerjasama, dan penetapan obyek kerjasama telah disepakati, maka langkah-langkah yang lebih maju dapat dilakukan. Tahap ketiga ini merupakan penganggaran teknis kerjasama diantara pemerintah daerah yang akan bekerjasama, yang diikuti oleh pihak pemerintah daerah Tingkat I yang bersangkutan. Pada tahap ini sudah dapat dibentuk panitia ad hoc yang bertugas melakukan perundingan-perundingan,

diskusi-diskusi dan pengkajian lebih lanjut terhadap detail-detail dari kerjasama yang akan dilakukan. Panitia hoc ini beranggotakan wakil-wakil dari Pemerintahan Daerah Tingkat II yang bermaksud bekerjasama ditambah wakil dari Pemerintah Daerah Tingkat I.

4. Ruang Lingkup Bidang-Bidang yang Dikerjasamakan

Di sini harus disepakati tentang bidang-bidang apa saja yang akan tercakup ke dalam ke dalam rangka kerjasama, serta disepakati pula batas-batas teknis dimana kerangka kerjasama itu disepakati pula batas-batas teknis dimana kerangka kerjasama itu dapat menjangkau aspek-aspek tertentu dari bidang kegiatan yang dikerjasamakan

a. **Susunan Organisasi dan Personalia**

Susunan organisasi dan personalia ditetapkan setelah terlebih dulu disepakati wadah yang mengelola kerjasama itu, misalnya apakah merupakan proyek bersama (pasal 5 Peraturan Mendagri Nomor 6/1975) ataukah berupa hukum tertentu (misalnya Otorita dan sebagainya);

b. **Tata cara dan ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan kerjasama**

Kejelasan tentang detail-detail tata cara dan teknis pelaksanaan kerjasama sangat diperlukan untuk menghindari adanya

kesimpangsiuran dalam operasionalisasi rencana yang telah ditetapkan;

c. Pembiayaan

Oleh karena setiap kerjasama selalu mengandung konsekuensi-konsekuensi keuangan, maka pembahasan tentang faktor biaya yang akan dikeluarkan dalam rangka kerjasama ini sangat perlu dilakukan;

d. Jangka Waktu

Suatu kerjasama tentu saja hanya diproyeksikan pada suatu obyek tertentu, dan obyek dikerjasamakan biasanya akan selesai mencapai targetnya pada waktu tertentu. Oleh karena itu penetapan tentang batas waktu berlakunya kerjasama itu perlu disepakati oleh masing-masing pihak;

e. Ketentuan-ketentuan lain yang dipandang perlu

Yang dimaksud dengan ketentuan lain adalah pengaturan tentang hal-hal di luar pokok-pokok yang dikemukakan mulai dari angka 1) sampai dengan 5) tersebut di atas;

f. Setelah panitia menyusun draft peraturan bersama yang akan menjadi landasan bagi kerjasama yang akan dilakukan, maka tahap ke empat adalah tahap finalisasi draft untuk selanjutnya dimintakan persetujuan DPRD Tingkat II dari masing-masing pihak;

g. Penanda tangan peraturan bersama oleh masing-masing Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan;

- h. Pengesahan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

5. Kerjasama di antara Daerah-Daerah Tingkat I

- a. Pada tahap awal keadaannya sama dengan yang berlaku di daerah tingkat II. Hanya saja di sini pihak pengambil keputusan yang dimaksud adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan pimpinan DPRD Tingkat I;
- b. Pada tahap kedua berlangsung sama, hanya ruang lingkupnya pada tingkat masing-masing propinsi;
- c. Pada tahap ketiga juga berlaku sama, dengan ruang lingkup Propinsi Dati I masing-masing. Demikian pula subyek-subyek yang dibahas adalah sama sesuai petunjuk Menteri Dalam Negeri;
- d. Tahap keempat juga sama, hanya disini yang memberi persetujuan adalah DPRD Tingkat I;
- e. Tahap kelima penandatanganan Peraturan Bersama oleh masing-masing Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan;
- f. Tahap keenam adalah pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yaitu mencari fakta-fakta baru yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah teori untuk memperdalam dan memperluas ilmu tertentu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Maryaeni (2005:35), menyatakan bahwa Penelitian deskriptif merupakan penggambaran pengalaman dan pemahan berdasarkan hasil pemakaian berbagai bentuk pengalaman sesuai dengan karakteristik sasaran penelitiannya. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2006:4), mendefinisikan Metode kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dan menggunakan metode pendekatan kualitatif, dalam penelitian ini tujuannya adalah menggambarkan dan mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan kenyataan mengenai Peranan Pemerintah dalam Modernisasi Pasar Besar.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pemusatan perhatian pada tujuan dari penelitian yang dilakukan. Fokus penelitian juga merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa penelitian lebih terfokus.

Fokus penelitian merupakan hal yang sangat penting. Dimana fokus penelitian berguna untuk membatasi penelitian yang dilakukan sehingga akan dapat memperjelas pembahasan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka terdapat beberapa hal yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. a. Peranan Pemerintah Dalam Pogram Modernisasi Pasar Besar Kota Batu.
 - (a) Stabilisator Modernisasi Pasar Besar Kota Batu
 - (b) Modernisator Modernisasi Pasar Besar Kota Batu
- b. Upaya Pemerintah dalam Pogram Modernisasi Pasar Besar Kota Batu
2. Faktor yang mempengaruhi Modernisasi Pasar Besar Kota Batu
 - (a) Efisiensi Pogram Modernisasi Pasar Besar Kota Batu
 - (b) Efektifitas Pogram Modernisasi Pasar Besar Kota Batu

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Adapun lokasi penelitian yang dijadikan sebagai tempat untuk mengadakan penelitian adalah di Kota Batu. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa:

1. Kota Batu merupakan tempat penelitian.
2. Pasar Besar harus dikembangkan agar dapat terus bertahan dari persaingan munculnya pasar modern.

3. Pogram kegiatan pemerintah tentang kerjasama pembangunan pasar besar harus di evaluasi.

Sedangkan yang menjadi situs penelitian adalah:

1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan sekretariat daerah yang di tugaskan untuk memaksimalkan pengelolaan aset daerah serta di tunjuk sebagai Team Kegiatan Kerjasama Daerah (TKKSD)

2. Bagian Perekonomian dan Pembangunan

Bagian Perekonomian dan Pembangunan merupakan sekertariat daerah yang memiliki tupoksi untuk melakukukan kerjasama dengan PT. Panglima Capital Iqoni.

3. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah dinas yang mengelola pasar besar Kota Batu

4. Pasar Besar

Pasar Besar Kota Batu memiliki potensi diantaranya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan merupakan sasaran pogram kegiatan kerjasama pemerintah Kota Batu dengan PT. Panglima Capital Iqoni

Alasan peneliti memilih tempat tersebut sebagai situs penelitian dikarenakan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Tempat tersebut sesuai dengan permasalahan dan fokus penelitian yang dirancang oleh peneliti, sekaligus mempermudah peneliti dalam memperoleh data yang diperlukan
2. Mempermudah proses penelitian karena bagian-bagian tersebut merupakan bagian-bagian yang dianggap oleh peneliti sebagai orang yang paling mengerti terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut sehingga informasi dan data yang diperoleh akan benar-benar sesuai dengan permasalahan.

D. Sumber dan Jenis Data

Menurut Lofland dalam bukunya Moleong (2006:57), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sedangkan dalam Arikunto (2002:107), sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data yang diperoleh.

Penelitian ini menggunakan sumber data yaitu dari:

1. Informan

Peneliti memperoleh secara langsung dari sumber asli sehubungan dengan obyek yang diteliti. Data ini didapat dari hasil wawancara peneliti dengan pihak-pihak yang dapat memberi informasi terkait dengan Peranan Pemerintah Daerah dalam Modernisasi Pasar Tradisional;

1. Bapak Andhang selaku Kabid Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu

2. Bapak Andi selaku staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu
3. Bapak Rahman selaku staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu
4. Bapak Oki selaku anggota himpunan pasar
5. Bapak Widi selaku Staf UPTD Pasar
6. Bapak Sunarto selaku Pedagang
7. Bapak Dul Slamet selaku pedagang
8. Bapak Yusuf selaku pedagang
9. Bapak Panji selaku pedagang
10. Saudari Nadya selaku pembeli atau pengunjung

2. Peristiwa

Peneliti memperoleh data atau informasi yang bersumber dari peristiwa atau fenomena yang dipandang cocok dan bermanfaat untuk mengungkap permasalahan atau fokus penelitian;

3. Dokumen

Dokumen merupakan sumber data yang dapat diperoleh dari berbagai dokumentasi yang tersedia dalam catatan penyelenggaraan pemerintah yang bersangkutan.

Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

Data primer adalah data berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan narasumber/informan dalam penelitiannya dan dapat direkam atau dicatat oleh peneliti. Data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah berupa teks hasil wawancara dengan beberapa informan, yaitu sebagai berikut:

a) Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1. Bapak Andhang selaku Kabid Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Bapak Andi selaku Kabid Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
3. Bapak Rahman selaku Staff Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian.

b) Pedagang

1. Bapak Okie selaku Anggota Himpunan Pasar
2. Bapak Widi selaku staf UPTD Pasar
3. Bapak Dul Slamet selaku pedagang
4. Bapak Yusuf selaku pedagang
5. Bapak Panji selaku pedagang
6. Bapak Sunarto selaku pedagang

c) Pembeli atau pengunjung

1. Saudari Nadya selaku pembeli atau pengunjung

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat, dan mendengarkan.

Data dapat diperoleh dari dokumen-dokumen atau arsip-arsip, buku, jurnal, artikel, dan sumber referensi/literatur yang lain terkait dengan judul penelitian ini. Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber karena dalam banyak hal dokumen dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk prediksi suatu tindakan yang akan dilakukan selanjutnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Teknik wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi yang dilakukan oleh dua orang. Di dalam proses wawancara tersebut melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan dan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu;

2. Teknik observasi

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Observasi dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap obyek-obyek yang diteliti. Observasi menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian dan untuk mempertajam analisis yang berhubungan dengan pokok amatan;

3. Teknik dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen dan dapat menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga menghasilkan data yang lengkap. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan teknik yang digunakan sebagai referensi untuk mengumpulkan data dalam penelitian dan untuk menunjang aktivitas dalam penelitian. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Peneliti sendiri

Penelitian kualitatif ini ciri-cirinya adalah memasukkan peneliti sendiri sebagai alat pengumpul data utama dalam proses wawancara dan analisa data;

2. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara maksudnya adalah rangkaian pertanyaan untuk membatasi dan mengarahkan pada fokus permasalahan dalam penelitian. Basrowi & Suwandi (2008: 138), dalam bukunya juga memaparkan bahwa:

Pedoman wawancara ini digunakan oleh peneliti sebagai pemandu, hal ini agar:

- a) Proses wawancara berjalan di atas rel yang telah ditentukan
- b) Informan dapat memberi jawaban seperti yang dikehendaki peneliti
- c) Peneliti tidak terlalu sulit membedakan antara data yang digunakan dan tidak
- d) Peneliti dapat lebih berkonsentrasi dengan lingkup penelitian yang dilakukan.

3. Instrumen penunjang lainnya

Instrumen penunjang contohnya yaitu buku, alat tulis, kamera, dan lain-lain.

G. Analisis Data

Miles, Huberman dan Saldana (2014:8), mengemukakan bahwa dalam melakukan analisis data terdapat beberapa alur kegiatan, meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun penjelasan mengenai beberapa alur kegiatan sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014:8-10), yang meliputi:

1. **Pengumpulan Data**

Cara peneliti dalam mengumpulkan data tentang Modernisasi Pasar Tradisional melalui Kerjasama antara Pemerintah Kota Batu dan Pemerintah Pusat melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian akan diproses (melalui penyuntingan dan pemindahan kata-kata) yang menjadi susunan teks yang diperluas;

2. **Kondensasi Data**

Tahap ini merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Peneliti memperoleh data terkait dengan judul peneliti mengenai Modernisasi Pasar Tradisional melalui Kerjasama antara Pemerintah Kota Batu dan Pemerintah Pusat;

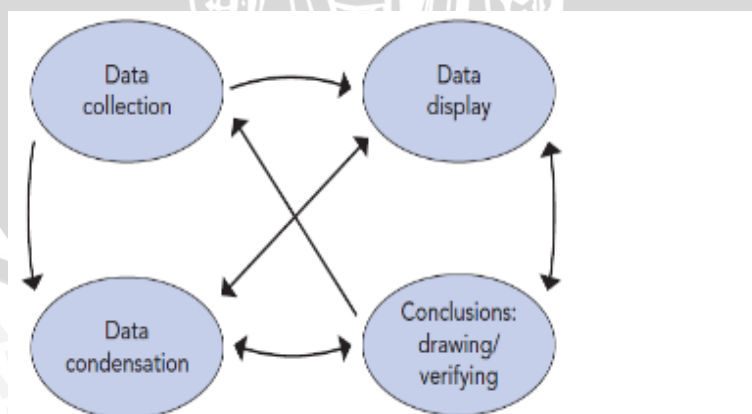
3. **Penyajian data**

Setelah melakukan reduksi data, tahap selanjutnya adalah mendisplaykan data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat dan memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti akan menyajikan data dalam bentuk kualitatif;

4. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung. Tetapi apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid maka merupakan kesimpulan yang kredibel.

Adapun model analisis data interaktif adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1: Komponen Analisis Data: Model Interaktif
Sumber: Miles, Huberman, dan Saldana 2014

Dari penjelasan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa agar dapat ditarik kesimpulan tentang kebenaran-kebenaran yang dapat dipahami. Alasan peneliti menggunakan metode pengolahan data Miles, Huberman dan Saldana (2014:8-10), yaitu karena peneliti memperoleh data dan informasi yang berbentuk naratif, penjelasan, dan penafsiran terhadap gambaran dari situasi yang ada di lapangan. Analisis data ini adalah analisis data model interaktif karena penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan, wawancara kepada informan yang terkait, dan berlangsung secara terus-menerus hingga selesai.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Wilayah Kota Batu

a. Sejarah Kota Batu

Berdasarkan kisah-kisah orang tua, maupun dokumen yang ada maupun yang dilacak keberadaannya, sampai saat ini belum diketahui kepastiannya tentang kapan nama “Batu” mulai disebut untuk menamai kawasan peristirahatan tersebut. Dari beberapa pemuka masyarakat setempat memang pernah mengisahkan bahwa sebutan Batu berasal dari nama seorang ulama pengikut Pangeran Diponegoro yang bernama Abu Ghonaim atau disebut sebagai Kyai Gubug Angin yang selanjutnya masyarakat setempat akrab menyebutnya dengan panggilan Mbah Wastu. Dari kebiasaan kultur Jawa yang sering memperpendek dan mempersingkat mengenai sebutan nama seseorang yang dirasa terlalu panjang, juga agar lebih singkat penyebutannya serta lebih cepat bila memanggil seseorang, akhirnya lambat laun sebutan Mbah Wastu dipanggil Mbah Tu menjadi Mbatu atau Batu sebagai sebutan yang digunakan untuk sebuah kota dingin di Jawa Timur.

Sedikit menengok ke belakang tentang sejarah keberadaan Abu Ghonaim sebagai cikal bakal serta orang yang dikenal sebagai pemuka masyarakat yang memulai *babad alas* dan dipakai sebagai inspirasi dari sebutan wilayah Batu, sebenarnya Abu Ghonaim sendiri adalah berasal dari wilayah Jawa Tengah. Abu

Ghonaim sebagai pengikut Pangeran Diponegoro yang setia, dengan sengaja meninggalkan daerah asalnya Jawa Tengah dan hijrah ke kaki Gunung Panderman untuk menghindari pengejaran dan penangkapan dari serdadu Belanda (Kompeni). Abu Ghonaim atau Mbah Wastu yang memulai kehidupan barunya bersama dengan masyarakat yang ada sebelumnya serta ikut berbagi rasa, pengetahuan dan ajaran yang diperolehnya semasa menjadi pengikut Pangeran Diponegoro. Akhirnya banyak penduduk sekitar dan masyarakat yang lain berdatangan dan menetap untuk berguru, menuntut ilmu serta belajar agama kepada Mbah Wastu. Awalnya mereka hidup dalam kelompok (komunitas) di daerah Bumiaji, Sisir, dan Temas namun akhirnya lambat laun komunitasnya semakin besar dan banyak serta menjadi suatu masyarakat yang ramai.

Kota Batu merupakan daerah otonom yang termuda di Provinsi Jawa Timur dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu. Sebelum menjadi Kota, Batu merupakan sebagian dari kabupaten Malang yang disebut dengan Kota Administratif Batu. Kota Batu dibagi menjadi 3 Kecamatan yaitu:

Tabel 1. Nama-nama kecamatan di Kota Batu

No	Kecamatan
1	Batu
2	Junrejo
3	Bumiaji

Kota Batu memiliki 5 kelurahan yaitu:

Tabel 2. Nama-nama kelurahan di Kota Batu

NO	NAMA KELURAHAN
1	Dadaprejo
2	Sisir
3	Temas
4	Songgokerto
5	Ngaglik

Sedangkan untuk desanya, Kota Batu mempunyai 19 desa yaitu:

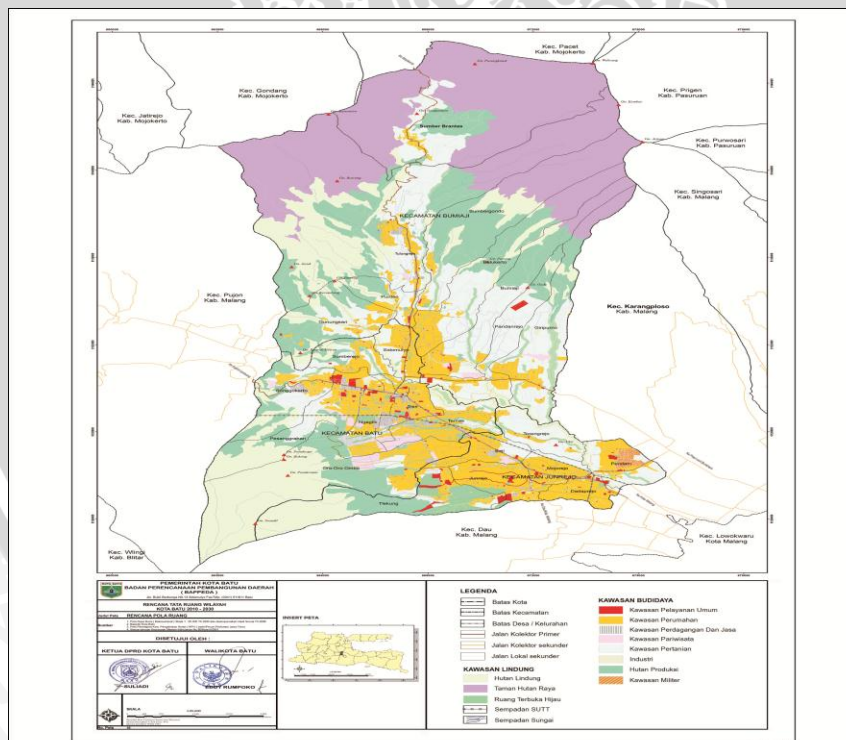
Tabel 3. Nama-nama desa di Kota Batu

NO	NAMA DESA	NO	NAMA DESA
1	Junrejo	11	Gunungsari
2	Torongrejo	12	Punten
3	Beji	13	Tulungrejo
4	Mojorejo	14	Sumbergondo
5	Pendem	15	Sumber brantas
6	Tlekung	16	Bulukerto
7	Oro-oro Ombo	17	Pandanrejo
8	Pesanggrahan	18	Beji
9	Sidomulyo	19	Giripurno
10	Sumberjo		

b. Kondisi Geografis dan Demografi

Kota Batu terletak pada posisi antara 7°44',55,11' sampai dengan 8°26',35,35' Lintang Selatan dan 122°17',10,90' sampai dengan 122°57',00,00' Bujur Timur. Kota Batu memiliki luas wilayah 19.908,72 ha atau sekitar 0,42 persen dari total luas Jawa Timur. Wilayah Kota Batu berbatasan dengan:

1. Sebelah utara: Kecamatan Prigen Kabupaten Mojokerto
2. Sebelah timur: Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang
3. Sebelah selatan: Kecamatan Dau dan Kecamatan Wagir
4. Sebelah barat: Kecamatan Pujon Kabupaten Malang



Gambar 4.1: Peta Kota Batu
Sumber: <http://www.skyscrapercity.com>

Keadaan geologi/tanah di Kota Batu secara umum dapat diklasifikasi menjadi 3 jenis tanah yaitu :

- a. Kambisol
- b. Aluvial
- c. Latosol

Dari ketiga kategori tersebut menunjukkan bahwa Kota Batu merupakan wilayah yang subur untuk pertanian karena jenis tanahnya merupakan endapan dari sederetan gunung yang mengelilingi Kota Batu. Ada tiga gunung yang berada di wilayah Kota Batu yaitu Gunung Panderman dengan ketinggian 2.010 Meter, Gunung Welirang dengan ketinggian 5.156 meter, dan Gunung Arjuno dengan ketinggian 3.339 meter

c. Pemerintahan

Secara administrasi, pemerintahan Kota Batu dipimpin oleh seorang Walikota dan Wakil Walikota yang membawahi koordinasi atas wilayah administrasi kecamatan yang dikepalai oleh seorang camat. Kecamatan dibagi lagi menjadi desa dan kelurahan yang dikepalai oleh seorang kepala desa dan seorang lurah. Seluruh camat dan lurah merupakan jajaran pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kota, sedangkan kepala desa dipilih oleh setiap warga desa setiap periode tertentu dan memiliki sebuah pemerintahan desa yang mandiri. Sejak tahun 2007, WaliKota Batu dan wakilnya dipilih langsung oleh warga kota dalam pilkada, setelah sebelumnya dipilih oleh anggota DPRD kota. Walikota dan Wakil WaliKota Batu saat ini adalah Eddy Rumpoko dan Panjul Santoso.

d. Pendapatan Daerah Regional Bruto (PRDB)

Ditinjau dari pendekatan produksi, Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Baku (ADHB) Kota Batu pada tahun 2014 mencapai 10.250,3 milyar. Apabila dibandingkan tahun 2013 maka ada kenaikan sebesar 12,9 persen. Pendukung utama PDRB ADHB Kota Batu pada tahun 2014 adalah sektor perdagangan, pertanian dan sektor jasa-jasainnya masing-masing mencapai 18 persen, 16 persen dan 15 persen. Perkembangan ekonomi Kota Batu atas dasar harga konstan tidak berbeda jika dibandingkan dengan harga yang berlaku. PDRB pada tahun 2014 mencapai 8.573,4 milyar naik sekitar 6,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan PDRB pada tahun 2014 sedikit melambat dibandingkan tahun 2013, yaitu sebesar 6,93 persen. Laju pertumbuhan sektor PDRB tertinggi masih pada sektor bangunan dimana tahun 2014 sebesar 11,31 persen dan sektor komunikasi tumbuh sebesar 9,04 persen. Sektor-sektor lainnya tumbuh antara 3-7 persen. Sektor pemerintahan merupakan sektor yang laju pertumbuhannya rendah yaitu sebesar 1,04 persen. Laju inflasi Kota Batu selama 2014 yang diukur dengan indeks implisit PDRB mencapai 4,73 persen. Pada tahun 2013, PDRB perkapita sebesar 46.271 ribu rupiah dan kemudian meningkat menjadi 51.612 ribu pada tahun 2014. Apabila pengaruh perubahan harga dikeluarkan maka PDRBperkapita atas dasar harga konstan pada tahun 2014 mencapai 43.169 ribu rupiah. Kemajuan ekonomi Kota Batu, tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Kota Batu yang selalu mendorong investor dan pelaku ekonomi yang bersifat

UMKM untuk tetap berpartisipasi dalam membangun Kota Batu sebagai Kota Wisata.

e. Visi dan Misi Kota Batu

a) Visi

Kota Batu sentra pertanian organik berbasis kepariwisataan Internasional

Ditunjang oleh pendidikan yang tepatguna dan berdaya saing

Ditopang oleh sumberdaya (alam, manusia, dan budaya) yang tangguh
diselenggarakan oleh pemerintah yang baik, kreatif, inovatif, dijiwai
oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

b) Misi

1. Peningkatan kualitas hidup antar umat beragama;
2. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan;
3. Mengembangkan pertanian organik dan perdagangan hasil pertanian organik;
4. Meningkatkan posisi peran serta dari kota sentra pariwisata menjadi kota kepariwisataan internasional;
5. Optimalisasi investasi daerah;
6. Peningkatan kualitas pendidik dan lembaga pendidikan;
7. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
8. Pengembangan infrastruktur (sektor fisik) khususnya perkantoran pemerintah, fasilitas publik, prasarana dan sarana lalu lintas;

9. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa, guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
10. Menciptakan stabilitas dan kehidupan politik di Kota Batu yang harmonis dan demokratis;
11. Pemberdayaan masyarakat melalui koperasi dan UKM;

B. Profil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu



Gambar 4.2: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu
Sumber: Dokumentasi Peneliti

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu terletak di Jalan Panglima Sudirman No 503 Kota Batu.

1. Visi dan Misi

a. Visi :

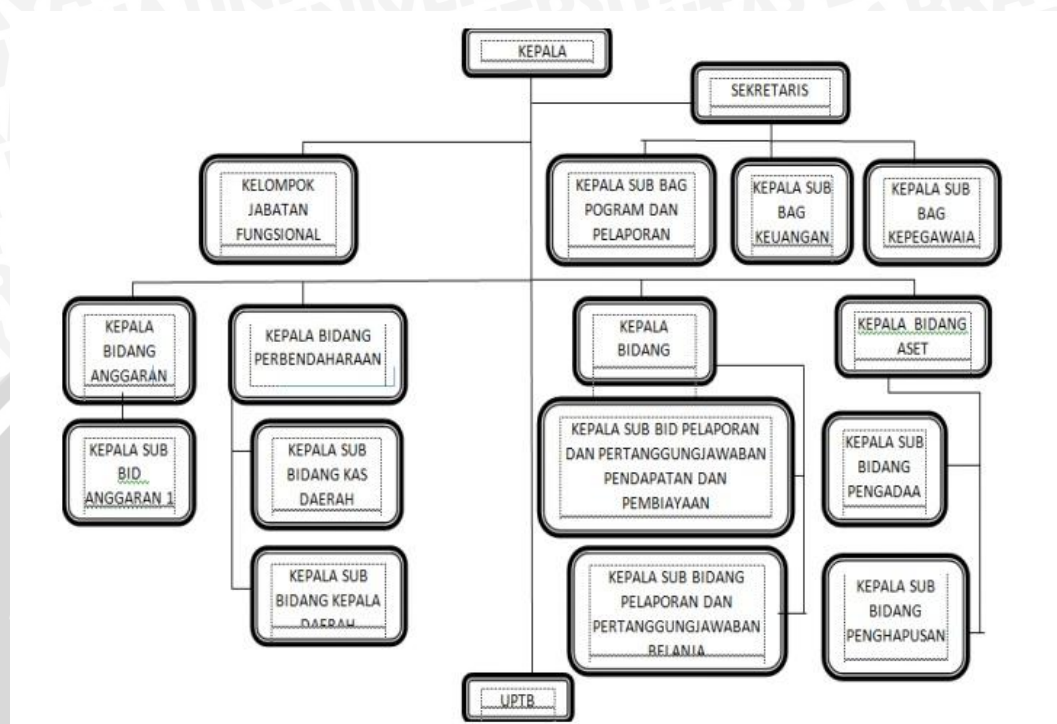
Visi pemerintah Kota Batu, yaitu “Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan menerapkan prinsip efektif, efisien, ekonomis yang didukung dengan sumber daya manusia pengelola yang profesional untuk meningkatkan daya saing Pemerintah Kota Batu”.

b. Misi:

Misi bertujuan untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan yang ingin dicapai oleh BPKAD Pemerintah Kota Batu, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Sehingga misi BPKAD Pemerintah Kota Batu adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) aparat bidang keuangan dan manajemen aset sesuai dengan Standar Pelayanan.
2. Mewujudkan Kualitas sistem Pengelola keuangan dan aset daerah secara terintegrasi dan berkelanjutan yang berbasis pinatausahaan yang baik, efektif, efisien, dan ekonomis sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Mewujudkan laporan keuangan dan aset daerah yang akuntabel sesuai dengan pemilik kepentingan dan peraturan perundangundangan.

2. Struktur Organisasi BPKAD Pemerintah Kota Batu



Gambar 4.3: Struktur Organisasi BPKAD Kota Batu
Sumber: Renstra Tahun 2012-2017 BPKAD Kota Batu

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Kepala Badan berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Badan maupun denagn lembaga teknis lainnya,. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu terdiri dari:

- Sekretariat
- Bidang Anggaran
- Bidang Perbendaharaan
- Bidang Akuntansi

e. Bidang Aset

Sekretariat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program. Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Penyusunan Program

Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Anggaran yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengkoordinasian, perumusan kebijakan serta penyusunan anggaran daerah. Bidang Anggaran membawahi:

- a. Sub Bidang Anggaran I
- b. Sub Bidang Anggaran II

Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan

pedoman teknis, melaksanakan pengelol, koordinasi, pembinaan dan pengendalian dibidang pennerimaan dan pengeluaran kas serta TP-TGR.

Bidang Perbendaharan terdiri atas:

- a. Sub Bidang Kas Daerah
- b. Sub Bidang Belanja Daerah

Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan akuntansi, melaksanakan prosedur akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas dan akuntansi selain kas, rekonsiliasi APBD, sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah yang dapat disajikan sebagai informasi untuk bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Bidang Akuntansi membawahi:

- a. Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Pemiayaan
- b. Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Belanja.

Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan kegiatan perencanaan, penatausahaan, investasi,

pengamanan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, perubahan status hukum, serta pengendalian aset. Bidang Aset membawahi:

- a. Sub Bidang Pengadaan dan Distribusi
- b. Sub Bidang Pemeliharaan dan Penghapusan

C. Profil Pasar Besar Kota Batu



Gambar 4.4: Pasar Besar Kota Batu
Sumber: Dokumentasi Peneliti

Pasar Besar Kota Batu adalah pasar yang berdiri sejak Kota Batu memiliki otonomi sendiri pada tahun 2001. Pasar Besar Kota Batu pasar utama yang menampung hasil pertanian maupun produk yang di hasilkan oleh warga masyarakat Kota Batu. Hasil Pertanian, kebutuhan sehari-hari hingga barang bekas ada di Pasar Batu. Lokasi Pasar Besar di jalan dewi sartika Kelurahan

Temas Kota Batu berhadapan dengan terminal Kota Batu membuat pasar sangat mudah di jangkau oleh masyarakat Kota Batu.

Pasar tersebut hingga sekarang masih berjalan dan dipergunakan oleh masyarakat Kota Batu untuk kegiatan jual beli barang dan tempat saling bertukar informasi. Keberadaan Pasar Besar sangat strategis karena dekat dengan terminal dan tidak jauh dari jangkauan seluruh petani yang ada di Kota Batu. Pasar Besar beroperasi mulai pukul 03.00 WIB sampai 21.00 WIB. Jam operasional Pasar Besar Kota Pukul 03.00 WIB sampai 09.00 adalah tempat pedangang sayur mengecerkan sayurnya kepada pedagang kecil untuk di jual lagi kepada masyarakat sekitar. Jam 09.00 WIB sampai 17.00 adalah jam operasional untuk penjual kebutuhan sehari-hari. Dan jam 17.00 sampai 21.00 adalah penataan meja untuk berjualan pedagang sayur di pagi hari.

D. Penyajian Data

Pasar Besar yang berada di Kelurahan Temas merupakan salah satu pasar di Kota Batu yang yang menjadi pusat jual beli oleh masyarakat Kota Batu terlebih lagi ketika hari libur datang. Di Batu banyak produk yang dihasilkan oleh masyarakat dari seluruh desa yang berada di Kota Batu. Produk yang di hasilkan masyarakat Kota Batu kebanyakan merupakan kebutuhan sehari-hari. Namun dengan berkembangnya produk masyarakat Kota Batu yang sebagian besar di jual di pasar besar Kota Batu. Pasar besar terasa kurang karena di Kota Batu belum terdapat pasar tradisional yang layak. Dengan adanya permasalahan ini, pemerintah daerah berinisiatif akan melakukan Modernisasi pasar besar tersebut.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Rahman selaku staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan bahwa:

“Kota Batu merupakan kota yang sudah terkenal dengan hasil pertanian dan produksi makanan yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Batu. Penduduk luar daerah pun banyak yang menjadikan Kota Batu sebagai tujuan utama di saat hari libur. Pasar Besar Kota Batu merupakan pasar utama yang memasok produk yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Batu dan tempat pembelian kebutuhan sehari-hari yang harganya dapat dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Dan dapat dilihat di sana belum ada tempat yang layak untuk berjualan. Untuk itu pemerintah Kota Batu memilih memodernisasi area tersebut menjadi pasar yang layak untuk berjualan.”

(wawancara dengan Bapak Rahman selaku staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu, tanggal 11 Agustus 2016, jam 11.00 WIB, di kantor).

Modernisasi ini memang sangat penting untuk dilakukan. Bisa dikatakan demikian karena Modernisasi ini membawa dampak yang sangat luar biasa nantinya. Modernisasi dilakukan salah satunya untuk menarik minat dari para pengunjung. Selain untuk menarik minat dari para pengunjung, hal ini juga berdampak luar biasa pada sektor perekonomian para pedagang dan Pendapatan Kota Batu. Hal ini dipertegas dengan penjelasan dari Bapak Rahman bahwa:

“Modernisasi sangat penting. Dengan adanya Modernisasi, pasar besar Kota Batu akan lebih memberikan kenyamanan untuk para pengunjung. Dengan rasa nyaman maka jumlah pengunjung akan meningkat. Meningkatnya pengunjung akan mampu meningkatkan pendapatan kota, pedagang, dan pelaku pasar lainnya.”

(wawancara dengan Bapak Rahman selaku Staff Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, tanggal 28 Oktober 2016, jam 13.00 WIB, di Balai Kota Batu).

Menurut salah satu pembeli atau pengunjung yaitu bernama Saudari Nadya yang pada waktu itu sedang ada di pasar besar tersebut, juga menjelaskan pentingnya dilakukan Modernisasi bahwa:

“Modernisasi pasar itu sangat penting ya untuk dilakukan. Kenapa saya berpendapat demikian? Karena hal ini yang pertama untuk menarik minat dari pembeli atau pengunjung sendiri. Mereka tidak akan tertarik jika tempat ini kotor dan kumuh. Melirik saja tidak apalagi untuk membeli. Oleh karena itu, peran dari pemerintah sangat diharapkan di sini. Modernisasi ini sebagai upaya dalam pembangunan nasional dan dampaknya juga sangat banyak. Pasar ramai, kesejahteraan pedagang juga tidak diragukan lagi.”
(wawancara dengan Saudari Nadya selaku pembeli atau pengunjung, tanggal 01 November 2016, jam 11.00 WIB, di pasar besar).

Selain itu, Pada awalnya program modernisasi ini juga mendapat sambutan yang baik dari para pedagang yang berjualan di pasar besar tersebut. Namun setelah pemilihan tender yang di menangkan oleh pihak ketiga. Masyarakat beranggapan bahwa pihak ketiga akan mengurangi hak pedagang dan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Andi bahwa:

“Pada awalnya pedagang menerima untuk di lakukan modernisasi pasar pada tahun 2011 namun pada tahun 2012 masyarakat menolak. Karena sebagian pedagang merasa produk yang diberikan oleh PT. Panglima Capital Iqoni di anggap mengurangi hak pedagang dan lebih mementingkan keuntungan pribadi”
(wawancara dengan Bapak Andi Staff Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, tanggal 28 Oktober 2016, jam 13.00 WIB, di Balai Kota Batu).

Selain menyetujui adanya Modernisasi di tahun 2011, para pedagang juga sangat senang mengetahui tempat yang mereka gunakan untuk berjualan atau untuk mencari nafkah ini akan di Modernisasi oleh pemerintah. Hal ini dipertegas oleh salah satu pedagang di area tersebut bahwa:

“Saya awalnya merasa sangat senang dengan adanya program Modernisasi terhadap pasar besar yang ada di daerah ini. Namun produk yang diberikan PT Panglima Capital Iqoni kurang diterima oleh kami (wawancara dengan Bapak Yusuf selaku pedagang, tanggal 26 Oktober 2016, jam 11.00 WIB, di Pasar Besar).

Selain Bapak Yusuf, pedagang lain juga merasa sangat senang dengan adanya Modernisasi ini. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu pedagang yang juga berprofesi sebagai ketua RW 03 bahwa:

“Saya selaku pedagang dan ketua RW 03 di sini, sangat setuju dan senang sekali dengan adanya Modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Kenapa demikian? Karena dengan adanya Modernisasi pasar besar ini akan membuat tempat ini semakin menarik untuk dikunjungi. Saya tidak setujunya apabila PT Panglima Capital Iqoni mengurangi hak pedagang Kota Batu”
(wawancara dengan Bapak Dul Slamet selaku pedagang, tanggal 02 November 2016, jam 11.00 WIB, di Pasar Besar).

Melihat tidak adanya persetujuan dari pihak-pihak terkait dengan Modernisasi ini, maka, modernisasi ini akan tidak akan berjalan dengan lancar.

1. a. Peranan Pemerintah Dalam Modernisasi Pasar Besar Kota Batu

Peranan pemerintah dalam modernisasi pasar besar Kota Batu sangatlah penting. Pasar besar kota batu merupakan aset milik pemerintah daerah kota batu semenjak berdirinya kota batu. Pasar Besar Kota Batu memberikan pendapatan kepada pemerintah kota Batu berupa pajak restribusi sewa kios, Restribusi Parkir dan Restribusi Lainnya. Pasar Besar Kota Batu Perlu adanya modernisasi mengingat perkembangan pertokoan modern di kota batu. Pemerintah kota batu mengupayakan untuk memodernisasi pasar besar kota batu seperti yang dijelaskan oleh Bapak Andhang selaku kabad badan pengelolaan keuangan dan aset daerah bahwa :

“Pemerintah kota batu mencoba menmodernisasi pasar besar kota batu pada tahun 2011”

(wawancara dengan Bapak Andhang, tanggal 22 Desember 2016, jam 11.00 WIB, di Balai Kota Batu).

Pemerintah membangun pasar besar kota Batu dengan menggunakan investor dari swasta dengan sistem kerjasama di bidang pembiayaan dan pengelolaan seperti yang dijelaskan bapak Andi Selaku Staff di badan pengelolaan keuangan dan aset daerah bahwa:

“Program kegiatan modernisasi pasar besar memang menggunakan bantuan dari investor. Pemerintah menyerahkan kegiatan modernisasi pasar besar kota batu dengan syarat-syarat yang telah disepakati antara kedua belah pihak”

(wawancara dengan Bapak Andi, tanggal 23 Desember 2016, jam 10.00 WIB, di Balai Kota Batu).

Modernisasi pasar besar kota melalui program kegiatan kerjasama dengan investor tidak diserahkan sepenuhnya kepada pihak investor. Namun pemerintah ikut berperan dalam modernisasi pasar besar kota batu. karena pasar besar kota batu merupakan aset yang sangat penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kota batu khususnya yang berprofesi pedagang dan profesi lainnya yang bersangkutan dalam proses perekonomian pasar besar kota batu. peran pemerintah kota batu dalam modernisasi pasar besar kota meliputi :

(a) Stabilisator Program Modernisasi Pasar Besar Kota Batu

Modernisasi pasar bresar kota batu pada tahun 2011 yang dilakukan dengan menggunakan metode kerjasama dengan PT. Panglima Capital Iqoni. Pembangunan pasar besar pada tahun 2011 yang dilakukan PT Panglima Capital menggunakan sistem bangun serah guna. Program bangun serah guna merupakan penyerahan pembagunan, pengelolaan dan perawatan fasilitas yang

ada di pasar besar kota batu. Program kerjasama bangun serah guna merupakan langkah terbaik yang bisa di gunakan pemerintah kota batu setelah melalui seleksi pemikiran. Hal tersebut dijelaskan oleh bapak Andi selaku staff Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bahwa :

“Modernisasi pasar besar kota dengan menggunakan bantuan investor merupakan cara terbaik bagi pemerintah kota batu mengingat jumlah APBD kota batu”
(wawancara dengan Bapak Andi, tanggal 23 Desember 2016, jam 10.00 WIB, di Balai Kota Batu).

Modernisasi pasar besar kota batu tidak seutuhnya diserahkan kepada PT.Panglima Capital Iqoni. Pemerintah tetap ikut mensosialisasikan pembangunan pasar besar kepada pedagang pasar serta seluruh anggota yang bersangkutan dengan modernisasi pasar besar kota batu. hal tersebut dijelaskan oleh bapak Rahman Staff dinas koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan bahwa:

“Kami mensosialisasikan program kegiatan pengembangan pasar besar kota batu kepada pedagang dan warga yang bersangkutan dengan proses perekonomian yang ada di pasar besar kota batu”
(wawancara dengan Bapak Rahman, tanggal 23 Desember 2016, jam 10.00 WIB, di Balai Kota Batu).

Penyataan tersebut juga diperjelas oleh Bapak Panji selaku pedagang di pasar besar kota batu bahwa:

“sosialisasi yang dikakukan pihak pemerintah kota batu bersama PT Panglima Capital Iqoni memang sering diakan. Hingga kini sosialisasi yang saya ikuti sebanyak 4 kali namun kami tetap menolak kalau pemerintah kota batu membangun pasar dengan bantuan PT. Panglima Capital Iqoni”
(wawancara dengan Bapak Panji, tanggal 22 Desember 2016, jam 10.00 WIB, di Rumah Bapak Panji)

PT Panglima Capital Iqoni membuat program yang tidak mampu diterima oleh pedagang pasar besar kota batu. pedagang pasar kota batu menolak program kerjasama pemerintah kota batu karena desain dan sistem yang diberikan PT. Panglima Capital Iqoni tidak memenuhi hak pedagang pasar besar kota batu. namun pemerintah berusaha agar masyarakat mengerti akan pentingnya program modernisasi pasar besar kota batu. hal tersebut dijelaskan oleh bapak Andhang selaku kabid Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bahwa:

“masyarakat menolak adanya program pemerintah membangun pasar besar dengan menggunakan sistem kerjasama dengan PT.Panglima Capital Iqoni. namun kami berupaya agar program tersebut saling menguntungkan di antara ketiga pihak”
(wawancara dengan Bapak Andhang, tanggal 23 Desember 2016, jam 10.00 WIB, di Balai Kota Batu).

Pedagang bahkan sering mengungkapkan keluhan kesahnya kepada pemerintah kota batu bahwa program tersebut harus diperbaiki dan pedagang menolak kalau di bangun dengan menggunakan bantuan kerjasama dengan PT.Panglima Capital Iqoni. Hal tersebut dijelaskan oleh bapak Andi selaku Staff Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bahwa:

“Kami terus mendapatkan keluhan kesah dari pedagang pasar besar kota batu dan berusaha meredam amarah pedagang pasar besar agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena pembangunan pasar ini menyangkut perekonomian masyarakat kota batu”
(wawancara dengan Bapak Andi, tanggal 23 Desember 2016, jam 10.00 WIB, di Balai Kota Batu).

Peran pemerintah sebagai stabilisator di dalam program modernisasi pasar besar kota batu pada tahun 2011 sangatlah penting mengingat program modernisasi pasar menyangkut perekonomian masyarakat kota batu.

(b) Modernisator Modernisasi Pasar Besar Kota Batu

Pengembangan infrastruktur di lingkungan pemerintahan kota batu kian lama semakin berkembang ke arah yang modern dengan dukungan banyaknya tempat wisata di kota perkembangan perbelanjaan di kawasan kota batu juga semakin modern. Namun keberadaan pasar tradisional kurang layak untuk ditempati sebagai tempat berjualan. Pemerintah mengadakan kegiatan modernisasi pasar pada tahun 2011. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Rahman Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian bahwa:

“Kegiatan pembangunan pasar besar kota berjalan sejak tahun 2011 hingga saat ini”
(wawancara dengan Bapak Rahman, tanggal 23 Desember 2016, jam 2.00 WIB, di Balai Kota Batu).

Pembangunan pasar besar dengan menggunakan sistem kerjasama dengan PT Panglima Capital Iqoni disusun berdasarkan sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Andhang selaku Kabid Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bahwa:

“Penyusunan program kegiatan pembangunan pasar besar sudah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu”
(wawancara dengan Bapak Andhang, tanggal 22 Desember 2016, jam 10.00 WIB, di Balai Kota Batu).

Dengan pembentukan program yang sistematis maka kerjasama antara pemerintah kota batu akan mendapatkan kelancaran. Pemerintah

bersama PT Panglima Capital Iqoni juga mengadakan Sosialisai yang bertujuan mengarahkan masyarakat kota batu agar masyarakat mampu memahami arti pentingnya dari program modernisasi pasar besar kota batu. hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Rahman Staff dinas koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan bahwa:

“Kami mensosialisasikan program kegiatan pengembangan pasar besar kota batu kepada pedagang dan warga yang bersangkutan dengan proses perekonomian yang ada di pasar besar kota batu” (wawancara dengan Bapak Rahman, tanggal 23 Desember 2016, jam 10.00 WIB, di Balai Kota Batu).

Peran Pemerintah menjadi Modernisator dalam program modernisasi pasar sangat penting karena yang mengetahui sistematikan peraturan pemerintah adalah pemerintahan sendiri.

b. Upaya Pemerintah dalam Modernisasi Pasar Besar Kota Batu

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kota Batu, mempunyai peranan yang sangat penting selaku TKKSD dalam hal Modernisasi pasar terlebih lagi Modernisasi pasar besar. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kota Batu, berpedoman pada Peraturan WaliKota Batu Nomor 46 Tahun 2013 tentang penjabaran tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Selain itu, peran dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Modernisasi memang sangat perlu untuk dilakukan. Modernisasi yang dilakukan pemerintah salah satunya yaitu dari segi fisik. Pasar yang ada di pasar besar tersebut, bangunannya dirasa sudah tidak layak huni. Sarana dan

prasarana yang ada juga tidak mendukung. Hal ini nantinya akan berdampak pada berkurangnya pengunjung yang menyebabkan Pendapatan Asli Daerah menurun. Para pengunjung akan ragu-ragu untuk datang ke pasar tersebut ketika mereka melihat pasar yang ada bisa dibilang kumuh dan kurang terawat. Oleh sebab itu pemerintah melakukan Modernisasi pasar tersebut dengan bantuan PT. Panglima Capital Iqoni terkait dengan pembangunan sarana dan prasarananya. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Andhang bahwa:

“Di area tersebut para pedagang masih menggunakan kios-kios yang dirasa pemerintah tidak layak untuk digunakan. Barang yang di jual oleh pedagang sering menutupi jalan pengunjung. Jalan pengunjungpun tidak layak dan beberapa atab dan fasilitasnya juga masih di bawah standar kualitas pasar yang baik. Untuk itu pemerintah memodernisasi pasar besar tersebut dengan melakukan kerjasama dengan PT. Panglima Capital Iqoni untuk melakukan Modernisasi pasar besar dengan metode bangun serah guna.
(wawancara dengan Bapak Andhang selaku BPKAD Kota Batu, tanggal 28 Oktober 2016, jam 11.00 WIB, di Balai Kota Batu).

Di dalam proses pembangunan untuk memodernisasi pasar ini, pemerintah bekerja sama dengan PT Panglima Capital Iqoni maupun dengan masyarakat. Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah beserta dengan pihak swasta adalah dalam proses pembangunan dan pengelolaan pasar yang di dasari dengan perjanjian kontrak. Pemerintah meminta bantuan pihak PT. Panglima Capital Iqoni untuk membangun pasar besar Kota Batu. Hal ini dipertegas dengan pernyataan dari Bapak Andhang bahwa:

“Pembangunan infrastruktur untuk memodernisasi pasar ini, pemerintah Kota Batu bekerjasama dengan pihak PT.Panglima Capital Iqoni. Pihak PT. Panglima Capital

Iqoni memberikan jasa pembangunan kontruksi akan mengelolanya dalam jangka waktu yang disepakati.”
(wawancara dengan Bapak Andhang selaku Kabid di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu, tanggal 28 Oktober 2016, jam 11.00 WIB, di Balai Kota Batu).

Pemerintah daerah Kota Batu melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku TTKSD dalam hal meodernisasi pasar besar hanya berkaitan dengan kerjasama antara PT. Panglima Capital Iqoni dengan Pemerintah Kota Batu. Kerjasama tersebut menggunakan sistem Bangun Serah Guna. Penjelasan tersebut dipertegas oleh dari Andi selaku staf BPKAD bahwa:

“Pada kesepakatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu, pihak PT. Panglima Capital Iqoni. Pasar Besar Kota Bangun akan di bangun oleh PT. Panglima Capital Iqoni dengan menggunakan dana investor. Dengan perjanjian kontrak di kelola oleh PT. Panglima Capital Iqoni selama 30-40 tahun.
(wawancara dengan Andi selaku staf BPKAD, tanggal 28 Oktober 2016, jam 13.00 WIB, di Balai Kota Batu).

Di dalam sebuah pembangunan, pasti ada dana yang harus dikeluarkan. Seperti halnya pembangunan pasar besar. Meski pembangunan tersebut menggunakan dana dari PT Panglima Capital Iqoni, Pemerintah Kota Batu telah menganggarkan dana demi terlaksananya Modernisasi pasar. Hal ini dipertegas dengan penjelasan dari Bapak Andhang bahwa:

“Untuk pembangunan pasar, pemerintah kota menggunakan sumber anggaran dari PT. Panglima Capital Iqoni. Namun pembangunan mengalami masalah yang menyebabkan terundurnya proses modernisasi pasar beasar. Sehingga perlu adanya pengkajian kembali draft MOU di tahun 2014 dengan mendatangkan tenaga ahli yang dipercaya oleh pemerintah Kota Batu.”
(wawancara dengan Bapak Andhang, tanggal 28 Oktober 2016, jam 13.00 WIB, di Balai Kota Batu)

Pembangunan menggunakan sistem kerjasama dengan PT. Panglima Capital Iqoni, jelas pemerintah Kota Batu tidak main-main. Pemerintah yang akan memodernisasi pasar ini harus mendapat izin dari pihak yang berkaian dengan modernisasi pasar. Modernisasi tidak bisa sembarangan dilakukan. Sebelum diadakan Modernisasi, pemerintah sering mengadakan sosialisasi terlebih dahulu. Agar masyarakat setempat mengetahui jika akan diadakan Modernisasi. Modernisasi tidak akan bisa berjalan tanpa adanya kesepakatan bersama. Oleh karena itu, pemerintah terkait mensosialisasikan program ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara semuanya. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Andhang selaku Kabid Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bahwa:

“Sosialisasi sudah dilakukan terutama kepada masyarakat sekitar dan anggota pedagang pasar besar. Dari kota sendiri bersama UPT Pasar melakukan sosialisasi sebanyak 2 kali di tahun 2012 untuk mendapatkan kesepakatan dari berbagai pihak. Namun karena keterbatasan waktu, UPT Pasar sendiri juga melakukan sosialisasi agar pedagang paham akan arti program Modernisasi yang akan dilakukan oleh pemerintah kota .”

(wawancara dengan Bapak Andhang selaku Kabid Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, tanggal 28 Oktober 2016, jam 13.00 WIB, di Balai Kota).

Selain dari Pemerintah Kota, PT. Capital Panglima Iqoni sendiri juga sering melakukan sosialisasi terkait dengan Modernisasi pasar besar kota batu. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu pedagang di pasar besar yaitu Bapak Yusuf bahwa:

“Anggota PT Capital Panglima Iqoni seringkali mensosialisasikan pembangunan ini kepada pihak pedagang. Kamipun sering mengungkapkan bahwa jangan

hanya mementingkan keuntungan pribadi. Kami juga sering menyampaikan kalau kami keberatan dengan pembayaran harga kios yang sebesar 28 juta untuk ukuran 4 m². Dalam pembangunannya perhatikan kemampuan daya beli lapak pedagang dan kebutuhan pedagang.”

(wawancara dengan Bapak Yusuf selaku pedagang, tanggal 26 Oktober 2016, jam 11.00 WIB, di pasar besar).

Pembangunan pasar besar ini dibangun dengan menggunakan model lantai 3 pada kesepakatan awal. Namun pada akhirnya saat proses pembangunan berlangsung PT Panglima Capital Iqoni Menggunakan model bangunan berlantai 4. Model tersebut kurang mendapat persetujuan dari para pedagang. Para pedagang berpikir, jika area tersebut dibangun dengan menggunakan model bangunan berlantai 4, itu dapat merugikan sebagian pedagang. Model dinilai kurang adil untuk dijadikan model dalam proses Modernisasi. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Dul Slamet bahwa:

“Saya setuju area ini di modernisasi tetapi saya kurang setuju jika menggunakan model bangunan berlantai 4. Saya lebih setuju jika menggunakan model bangunan berlantai 3. Karena saya menganggap model berlantai 3 tidak akan menambah jumlah pedagang terlalu banyak sehingga persainganpun tidak semakin sulit”

(wawancara dengan Bapak Dul Slamet selaku pedagang, tanggal 02 November 2016, jam 11.00 WIB, di pasar besar).

Selain itu, Bapak Yusuf selaku pedagang di sana juga kurang setuju dengan adanya pembangunan Modernisasi model berlantai 4. Bapak Yusuf menambahkan pendapatnya terkait dengan pembangunan model area tersebut bahwa:

“Saya kurang setuju jika pembangunan dilakukan dengan model bangunan berlantai 4. Kenapa tidak menggunakan model bangunan yang berlantai 3 saja? Saya merasa jika

pembangunan dengan bangunan berlantai 4 akan memicu konflik antar pedagang nantinya.”

(wawancara dengan Bapak Yusuf selaku pedagang, tanggal 26 Oktober 2016, jam 11.00 WIB, di pasar besar).

Ketidaksetujuan para pedagang terhadap model yang pembangunan yang di contohkan PT Panglima Capital Iqoni, nantinya diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah.

Pasar besar kota dibangun oleh PT. Panglima Capital Iqoni dengan penambahan infrastruktur berupa kios, los dan fasilitas lainnya. Hal tersebut terdapat di draft MOU tentang investasi pembangunan pasar pasar besar Kota Batu dengan pola bangun serah guna (BOT) pasal 3 Obyek Kerjasama dan Lokasi hal tersebut di jelaskan oleh Bapak Panji selaku pedagang pasar bahwa:

“Sosialisasi yang dilakukan oleh PT Panglima Capital Iqoni membicarakan tentang model pembangunan pasar besar. PT Panglima Capital Iqoni akan menabahkan beberapa fasilitas masjid, Pom Bensin dan lapangan futsal. Yang menurut PT Panglima Capital Iqoni merupakan fasilitas pendukung penambahan jumlah kedatangan pengunjung. namun menurut kami itu akan mengurangi jumlah luas bangunan untuk kami berjualan.”

(wawancara dengan Bapak Panji, tanggal 28 Oktober, jam 13.00 WIB, di Pasar Besar)

Penambahan fasilitas akan mengurangi luasan tempat parkir yang dipergunakan pedagang untuk menaik turunkan barang dagangannya dari mobil pengangkut barang hal tersebut di jelaskan oleh bapak Panji selaku pedagang bahwa:

PT. Panglima Capital Iqoni sering kali bermusyawarah kepada kami namun belum menemui titik kesepakatan antara kita dengan PT Panglima Capital Iqoni. Penambah infrastruktur berupa masjid, lapangan futsal dan pom bensin

akan mengurangi luas parkir pasar. parkir dibutuhkan untuk truk-truk yang mengantarkan sayuran dari Kota Batu ke kota lain. Terkadang truk yang berada disini pun parkir di luar pasar. karena tidak cukupnya lahan parkirnya. (wawancara dengan Bapak Panji, tanggal 28 Oktober, jam 12.00 WIB, di Pasar)

Pasar besar ini diagendakan akan dapat menampung beberapa pedagang. Jumlah dari pedagang yang dapat menjual barang dagangannya adalah 1400. Hal ini sesuai dengan ukuran bangunan dan diambil dari kesepakatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, PT Panglima Capital Iqoni serta Pedagang yang bersangkutan dengan kegiatan modernisasi Pasar. Hal ini dipertegas dengan penjelasan dari Bapak Widi staf UPTD pasar besar bahwa:

“Kami bersama bersama team yang ditunjuk untuk kegiatan modernisasi pasar besar yang dilakukan dengan kerjasama dengan PT.Panglima Capital Iqoni dan UPT pasar ketika musyawarah dilakukan perhitungan jumlah pedagang yang berjualan di pasar tersebut dengan jumlah 1400 pedagang pada tahun 2011.”
(wawancara dengan Bapak Widi , tanggal 24 Oktober 2016, jam 13.00 WIB, di rumah Bapak Widi)

Modernisasi yang dilakukan pemerintah Kota Batu melalui kerjasama dengan PT. Panglima Capital Iqoni ini terkait dengan peningkatan kualitas dan sarana pasar dianggap merugikan pedagang. Pedagang merasa dirugikan karena lapak yang awalnya luas menjadi berukuran 4 m² dengan membayar 28 juta merasa merugikan pedagang. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Panji selaku pedagang bahwa:

“PT. Panglima Capital Iqoni memeberikan fasilitas kios seluas 4 m². Harga yang di patok adalah 28 juta dengan cicilan 23 ribu perhari. Kalau kios kami berukuran lebih

dari 4 m² maka kami harus membayar 2x lipat atau lebih. Hal tersebut sangat memberatkan kami.”

(wawancara dengan Bapak Panji selaku pedagang, tanggal 26 Oktober 2016, jam 06.00 WIB, di Pasar Besar).

Modernisasi dalam rangka meningkatkan kualitas dan sarana pasar, selain menguntungkan para pedagang karena pasar menjadi lebih layak dan rapi, pasar juga dapat lebih menarik pengunjung dan lebih bersih lagi. Hal ini dipertegas dengan penjelasan dari Bapak Sunarto bahwa:

“Kalau dilihat dari proses pembangunan, tentu sangat menguntungkan bagi kami para pedagang. Karena dengan adanya Modernisasi peningkatan kualitas dan sarana, pasar menjadi lebih bersih dibandingkan dengan yang sekarang ini. Sehingga pengunjung tidak enggan untuk singgah ke lapak kami.”

(wawancara dengan Bapak Sunarto selaku pedagang, tanggal 26 Oktober 2016, jam 11.00 WIB, di Pasar Besar)

Jumlah kios pedagang akan bertambah yang semulanya hanya 1400 kios akan di tambahkan menjadi 3800 kios dalam tiga lantai. Hal tersebut di tolak oleh pedagang pasar. karena penambahan jumlah akan berdampak negative kepada pedagang pasar. hal ini juga dipertegas oleh penjelasan bapak Sunarto selaku pedagang bahwa:

“kami sering mengadakan perkumpulan dengan PT. Panglima Capital Iqoni pada awal program modernisasi yang diterapkan di pasar besar ini namun PT. Panglima Capital menambah jumlah kios menjadi 3800 kios. Kios tersebut dibangun dengan mengurangi jumlah luasan kios yang di miliki pedagang saat ini. Ini membuat kami enggan untuk menerima program yang di ajukan oleh PT. Panglima Capital Iqoni”

(wawancara dengan Bapak Sunarto selaku pedagang, tanggal 26 Oktober 2016, jam 11.00 WIB, di Pasar Besar)

Perubahan yang dilakukan PT. Panglima Capital Iqoni tidak hanya perubahan dalam bangunan infrastruktur. Namun peralihan dari pasar tradisional menjadi pasar modern. Hal tersebut dirasa merugikan oleh pedagang karena daya jual barang tidak akan pernah menyesuaikan dengan harga beli dari pertani. Hal ini juga dipertegas oleh penjelasan bapak Yusuf selaku anggota himpunan pedagang pasar bahwa:

“perubahan yang dilakukan oleh PT. Panglima Capital Iqoni tidak hanya merubah dari segi bagunannya saja namun kami juga harus merubah tatacara berdagang agar sedikit beralih kepada tata cara berjualan yang modern. Kami beranggapan bahwa dengan tata cara berjualan yang modern tentu akan menguntungkan pengusaha yang bermodal besar. Dan seiring berjalannya waktu pedagang yang modelnya kecil akan bangkrut”
(wawancara dengan Bapak Yusuf selaku pedagang, tanggal 26 Oktober 2016, jam 11.00 WIB, di Pasar Besar)

Peningkatan sarana prasarana untuk menambah ketertarikan pengunjung yang dilakukan PT. Panglima Capital Iqoni Mulai dari tahun 2010 sampai berakhirnya 2016 ini pun tidak mampu mendapatkan hasil sesuai yang masyarakat harapkan dan menimbulkan konflik antara pedagang dengan PT. Panglima Capital Iqoni. Pemerintah mengupayakan meredakan konflik agar kegiatan pembangunan pasar besar Kota Batu berjalan dengan lancar. Seperti yang dijlaskan oleh Bapak Andhang selaku kbid di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bahwa:

“kami bersama team dari dinas lain menampung keluhan para pedagang. Banyak pedagang yang mengeluhkan bahwa PT. Panglima Capital Iqoni tidak memperhatikan hak pedagang pasar besar Batu. Dan kami selalu menyampaikan kepada PT.Panglima Kapital Iqoni”
(wawancara dengan Bapak Andhang, tanggal 16 Desember 2016, jam 11.00 WIB, di Balai Kota Batu)

Dengan adanya negoisasi antara pemerintah kota batu dengan PT.Panglima Capital Iqoni. Pemerintah juga mengupayakan bahwa untuk mengevaluasi kembali draft MOU yang berisikan kerjasama pembangunan pasar besar kota batu. Seperti yang dijlaskan oleh Bapak Adhang selaku kabid di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bahwa:

“kami berupaya mengevaluasi kembali draf MOU dengan bantuan pihak-pihak lembaga riset lainnya untuk membantu kami dalam mengevaluasi kembali perjanjian kerjasama yang di lakukan dengan PT. Panglima Capital Iqoni”
(wawancara dengan Bapak Andhang, tanggal 16 Desember 2016, jam 11.00 WIB, di Balai Kota Batu)

Selain evaluasi draf MOU pemerintah juga mengevaluasi laporan pengembangan pembangan pasar besar yang dikerjasamakan dengan konsultan Cipta Yasa Konsultan. Seperti yang dijlaskan Bapak Adhang selaku kabid di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bahwa:

“Evaluasi laporan akhir dari pembangunan pasar besar yang kami terima. Agar kami mengetahui outcome dari program pembangunan pasar besar yang dikerjasamakan dengan PT Panglima Capital Iqoni”
(wawancara dengan Bapak Andhang, tanggal 16 Desember 2016, jam 11.00 WIB, di Balai Kota Batu)

Pembangunan pasar besar yang berupaya untuk mensejakterakan pedagang pasar besar Kota Batu tetap mengalami konflik dan masyarakat meminta agar pembangunan pasar besar dilakukan dengan menggunakan APBD Pemerintah Kota Batu. Untuk itu harus ada pengkajian ulang terhadap modernisasi pasar besar Kota Batu. Agar tidak ada pihak yang dirugikan. Pemerintah mengupayakan agar pembangunan modernisasi pasar

berpihak kepada pedagang pasar besar kota batu seperti yang di jelaskan oleh bapak andhang selaku kepala bidang di badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota batu bahwa:

1. Faktor yang Mempengaruhi Modernisasi Pasar Tradisional

a. Efisiensi modernisasi pasar besar kota batu

Dalam pembangunan pasar besar kota batu pemerintah kota batu pemerintah kota batu mengadakan perjanjian dengan PT Panglima Capital Iqoni untuk membangun dan mengelola pasar besar kota batu. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Adhang selaku kabid di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bahwa:

“Pembangunan Pasar Besar Kota Batu dilakukan dengan kerjasama PT. Panglima Capital Iqoni sebagai pembangun dan pengelola pasar besar kota batu”
(wawancara dengan Bapak Andhang selaku Kabid, tanggal 16 Desember 2016, jam 11.00 WIB, di Balai Kota)

Pembangunan yang dilakukan PT Panglima Capital Iqoni juga di dukung dengan adanya Evaluasi Draft MOU yang menjadikan bukti bahwa Pemerintah kota batu melakukan kerjasama dengan PT Panglima Capital Iqoni. PT Panglima Capital Iqoni dengan pemerintah kota batu. Pembangunan dilakukan dengan cara kerjasama hal tersebut sangat efisien dalam mengembangkan Infrastruktur yang ada di pasar besar Kota Batu. Seperti yang dijlaskan oleh Bapak Adhang selaku kabid di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bahwa:

“program kegiatan kerjasama dengan investor sangat menguntungkan dan efisien dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, karena akan menghemat pengeluaran

belanja daerah untuk pengembangan infrastruktur yang ada di Kota Batu”

(wawancara dengan Bapak Andhang, tanggal 16 Desember 2016, jam 11.00 WIB, di Balai Kota Batu)

Kerjasama yang dilakukan pemerintah kota batu sangat efisien dalam pengembangan infrastruktur yang ada di Kota Batu. Dan pemerintah tidak mengeluarkan biaya dalam proses kegiatan pembangunan pasar besar Kota Batu sesuai dengan perjanjian yang ada. Namun pemerintah berupaya agar pemerintah Kota Batu tetap mendapatkan masukan dari adanya pasar besar tersebut. Seperti yang dijlaskan oleh Bapak Adhang selaku kabit di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bahwa:

“sesuai dengan perjanjian yang ada. Pemerintah tetap mendptkan masukan dari adanya pembangunan pasar besar Kota Batu. Hal tersebut sangat efisien karena pemerintah tetap mendapatkan pendapatan dari pasar besar kota batu.”

(wawancara dengan Bapak Andhang, tanggal 16 Desember 2016, jam 11.00 WIB, di Balai Kota Batu)

Mengadakan sosialisasi kepada pedagang pasar besar Kota Batu yang berencana memodernisasi pasar besar kota batu. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Panji selaku pedagang di pasar bersar Kota Batu bahwa:

“Pasar besar akan di modernisasi oleh PT Panglima Capital Iqoni. PT Panglima Capital Iqoni sering menjelaskan kepada kita tentang pembangunan pasar besar Kota Batu yang akan di bangun dengan 3 lantai”

(wawancara dengan Bapak Panji selaku pedagang, tanggal 26 Oktober 2016, jam 11.00 WIB, di Pasar Besar)

Dalam sosialisasi pemerintah kota batu bersama PT Panglima Capital Iqoni menjelaskan bahwa pembangunan Pasar Besar Kota Batu di bangun

sebanyak 4000 kios dengan luas 4 m² hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Panji selaku pedagang pasar besar kota batu bahwa:

“Pembangunan Pasar Batu yang dilakukan oleh PT Panglima Capital Iqoni mensosialisasikan kepada kami, bahwa akan di bangun kios pedagang sejumlah 4000 kios dengan luas 4 m²”

(wawancara dengan Bapak Panji selaku pedagang, tanggal 26 Oktober 2016, jam 11.00 WIB, di Pasar Besar)

Peranan pemerintah Kota Batu dalam pembangunan pasar besar merupakan suatu hal yang sangat penting. Kerjasama yang dilakukan pemerintah kota batu sangat efisien karena dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan pasar besar. Dengan adanya pembangunan yang di lakukan oleh PT Panglima Capital Iqoni maka pedagang akan tertata dengan rapi. Fasilitas-fasilitas yang ada di dalam pasar besar kota batu tetap terjaga. Dan aset milik pemerintah kota batu berupa pasar menjadi lebih modern dan mampu bersaing dengan pasar modern maupun mall yang ada di Kota Batu

b. Efektifitas Dalam Modernisasi Pasar Besar.

Pembangunan pasar besar Kota Batu dengan kerjasama dengan PT Panglima Capital Iqoni bertujuan untuk efektifitas penggunaan anggaran belanja kota batu dengan waktu pengembangan dalam meningkatkan fasilitas umum yang berada di kawasan Kota Batu hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Adhang selaku kabid di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bahwa:

“Pembangunan yang menggunakan metode kerjasama dengan investor sangat menguntungkan bagi pemerintah Kota Batu. Hal tersebut mampun meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kota batu secara singkat”

(wawancara dengan Bapak Adhang selaku kabid di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, tanggal 2 November 2016, jam 11.00 WIB, di Balai Kota Batu)

Selain membangun, pemerintah menyerahkan pasar besar kepada PT Panglima Capital Iqoni untuk dikelola dengan selama 20 tahun sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah Kota Batu dengan PT. Panglima Capital Iqoni sesuai dengan Draft MOU tentang kerjasama pemerintah Kota Batu dengan PT Panglima Capital Iqoni pasal 12 ayat 2 yang menyatakan bahwa “perjanjian kerjasama pengelolaan pasar besar Kota Batu akan berlangsung selama 20 tahun sejak di tanda tangani dan dapat diakhiri lebih awal berdasarkan ketentuan perjanjian kerjasama ini”

Kerjasama selama 20 tahun pemerintah Kota Batu, dalam perjanjian Kota Batu tetap mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari pengelolaan pasar besar Kota Batu yang dikelola oleh PT Panglima Capital Iqoni yang di dapatkan dari pajak restribusi pasar dengan total sejumlah 800.000.000. hal tersebut dijelaskan di dalam Evaluasi Draft MOU tentang investasi pembangunan pasar besar kota batu dengan pola bangun serah guna (BOT) antara pemerintah kota batu dengan PT Panglima Capital Iqoni Pasal 8 yang menyatakan bahwa “Intergrasi restribusi pasar, kebersihan dan keamanan, parkir, reklame, serta beberapa pendapatan lainnya dari fasilitas terbangun yang berkaitan langsung dengan pengelolaan pasar besar Kota Batu dan dilakukan penyesuaian secara periodik (setiap 1 tahun) berdasarkan hasil evaluasi”

Selain itu pembangunan pasar besar Kota Batu sangat di anggap sangat efektif dalam penarikan jumlah pengunjung pasar besar dalam waktu singkat.

Pembangunan pasar besar di bangun dengan 3 lantai dengan lantai dasar adalah rest area. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Rahman Staff dinas koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan bahwa:

“Program kegiatan modernisasi pasar sangatlah efektif untuk menambah jumlah pengunjung pasar besar kota batu mengingat bahwa jalur yang dilewati pasar besar merupakan satu arah dan jalan utama dari arah malang menuju tempat wisata di Kota Batu”
(wawancara dengan Bapak Rahman selaku staff Diskoperindag, tanggal 2 November 2016, jam 11.00 WIB, di Balai Kota Batu)

Selain tambahan infrastruktur penambahan jumlah kios akan menambah jumlah pedagang dan meningkatkan pendapatan restribusi bagi pemerintah Kota Batu dan perapian PKL yang berdagang di jalanan pasar besar Kota Batu. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Rahman Selaku staff Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian bahwa:

“Penambahan jumlah kios akan menambah jumlah pendapatan kota batu dari restribusi kebersihan dan keamanan. Selain itu pedagang yang menutupi tempat jalan pengunjung akan di tata lebih rapi ke dalam kios-kios”
(wawancara dengan Bapak Rahman selaku staff Diskoperindag, tanggal 2 November 2016, jam 11.00 WIB, di Balai Kota Batu)

Infrastruktur yang berada di kawasan pasar besar kota batu akan ditambahkan dengan beberapa fasilitas yang dibutuhkan oleh para pengunjung, saat ini pasar besar tidak mempunyai fasilitas berupa masjid. Sehingga PT Panglima Capital Iqoni menambahkan beberapa fasilitas tambahan berupa masjid dan fasilitas lainnya. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Panji selaku pedagang di pasar besar bahwa:

“selama ini pasar tidak mempunyai masjid. Apabila untuk pedagang yang beragama islam ingin menuaikan ibadah. Kami harus berjalan ke masjid yang berada di belakang terminal utama Kota Batu”

(wawancara dengan Bapak Panji selaku Pedagang, tanggal 28 Oktober 2016, jam 11.00 WIB, di rumah bapak panji)

Penambahan infrastruktur masjid akan mempermudah orang melakukan ibadah yang sebagian besar pedagang beragama islam. Ukuran kios yang seluas 4 M² mampu merapikan peta pedagang pasar yang selama ini banyak berjualan di tempat-tempat yang seharusnya tidak boleh berdagang. Hal tersebut dijelaskan oleh bapak Rahman staff dinas kopersu, UKM Perindustrian dan Perdagangan bahwa:

“Ukuran pasar yang tidak terlalu besar akan meringankan pedagang dalam hal pembayar biaya pembangunan kios”

(wawancara dengan Bapak Rahman selaku staff diskoperindag, tanggal 2 November 2016, jam 11.00 WIB, di Balai Kota Among Tani)

Modernisasi pasar besar dengan penambahan infrastruktur akan mampu mengembangkan pasar besar Kota Batu kedepannya. Karena penambahan infrastruktur sangatlah efektif untuk menambah jumlah ketertarikan serta akan menambah pendapatan bagi para pedagang, investor dan pemerintah Kota Batu.

E. Pembahasan

Pasar mempunyai peran yang sangat penting. Arti dari pasar sendiri menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat

perdagangan maupun sebutan lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, pasar tradisional kini eksistensinya sudah tergeser dengan pasar modern. Padahal jika dilihat, pasar tradisional mempunyai peran yang sangat penting. Selain sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, pasar tradisional merupakan tempat untuk memasarkan produk usaha kecil dan menengah (UKM). Jadi pasar tradisional juga bisa diebut dengan tempat untuk bekerja para pedagang usaha kecil dan menengah. Pergeseran eksistensi pasar tradisional oleh pasar modern harusnya menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memikirkan cara agar pasar tradisional tidak kalah dengan pasar modern. Fungsi dari pemerintahan menurut Ryass Rasyid dalam Ndraha (2005:58), yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Dengan adanya fungsi-fungsi tersebut, jelas sudah bisa disimpulkan bahwa pemerintah harus melakukan pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Pemerintah harus memberikan pelayanan sebaik mungkin untuk masyarakat.

Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting. Menurut Poerwodarminto (2005:854), Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam peristiwa, dan kata peran mempunyai arti seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, sedangkan peranan diartikan sebagai bagian dari tugas yang harus dilaksanakan. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, pemerintah memiliki fungsi dan peran tertentu. Menurut Kaufman dalam Thoha (1995:101), Fungsi pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya

mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan *power* yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.

Pemerintah harus memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat. Dengan pelayanan yang maksimal, masyarakat akan merasa sejahtera. Masyarakat yang menjual barang dagangannya di pasar tradisional, tidak akan merasa sejahtera jika pasar tradisional kalah dengan pasar modern. Oleh karena itu, yang pertama dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan Modernisasi pasar tradisional. Modernisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran/degradasi. Skala Modernisasi ada tingkatan makro dan mikro. Menurut Danisworo (2002), Proses Modernisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial.

Pemerintah Daerah Kota Batu melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku TKKSD (Team Koordinasi Kerjasama Daerah), melakukan kerjasama dengan PT. Panglima Capital Iqoni untuk memodernisasi pasar besar Kota Batu. Pasar Besar Kota Batu perlu adanya modernisasi. Pasar besar merupakan pasar utama di Kota Batu yang mensuplai kebutuhan pokok masyarakat Kota Batu. Pasar Besar terkenal dengan barang jualan yang murah yang mampu di jangkau masyarakat mulai dari masyarakat yang berekonomi rendah sampai masyarakat yang berekonomi tinggi.

Modernisasi dinilai menjadi salah satu solusi yang tepat untuk pembangunan nasional dan merupakan fasilitas jual beli masyarakat Kota Batu yang dinilai salah satu fasilitas yang harus dimodernisasi di Kota Batu. Pasar tradisional menyangkut kesejahteraan banyak orang. Terlebih lagi para pedagang yang berjualan. Para pedagang menghidupi keluarga atau mencari nafkah di tempat tersebut. Jika tempat tersebut tidak layak, maka akibatnya akan sedikit pengunjung atau pembeli yang datang ke sana. Ibaratnya, melirik saja tidak apalagi untuk mampir dan membeli dagangan para pedagang. Dengan adanya Modernisasi, dapat membuat para pengunjung atau pembeli merasa nyaman. Dengan demikian, pasar tradisional menjadi ramai pengunjung atau pembeli. Meningkatnya para pengunjung, dapat membuat pendapatan para pedagang dan desa menjadi bertambah. Ini dapat membuat sektor ekonomi naik. Oleh karena itu, Modernisasi pasar tradisional sangat penting.

Pada awalnya, pedagang setuju dengan modernisasi pasar tradisional apabila di bangun dari segi fisiknya. Pedagang banyak menyetujui program yang pada sosialisasi awal akan memberikan fasilitas kepada pedagang pasar besar. Pemerintah membangun fasilitas pasar dengan Investor asing yang memenangkan pelelangan pemilihan tender untuk memoderinasi pasar besar Kota Batu. Kerjasama yang di tawarkan oleh pemerintah Kota Batu adalah kerjasama dengan pola bangun serah guna. Pemenang pelelangan program modernisasi pasar besar Kota Batu adalah PT Panglima Capital Iqoni .

Modernisasi ini membutuhkan kerjasama. Modernisasi tidak bisa sembarangan dilakukan tanpa adanya kerjasama. Yang dimaksud dengan

kerjasama menurut Pamudji (1985:12-13), adalah pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah beserta dinas yang terkait dalam TKKSD dalam program modernisasi pasar besar Kota Batu dengan PT. Panglima Capital Iqoni

1. a. Peranan Pemerintah Daerah dalam Modernisasi Pasar Tradisional

peranan pemerintah dalam modernisasi pasar besar kota batu memiliki arti yang sangat penting karena pasar besar kota batu merupakan aset milik pemerintah kota batu yang memberikan pemasukan kepada pemerintah kota batu. namun keberadaan pasar modern yang berada di kawasan kota menjadikan pasar besar kota batu menjadi pasar yang kurang layak untuk di ditempati untuk berdagang. Pemerintah kota batu mengadakan program modernisasi pasar yang dikerjakan melalui kerjasama antara pemerintah kota batu dengan PT Panglima Capital Iqoni. Kerjasama tersrbut menggunakan metode Bangun Serah Guna. Bangun Serah Guna adalah pembangunan yang di biyai oleh PT Panglima Capital Iqoni yang kemudian pasar besar kota batu di kelola oleh PT Panglima Capital Iqoni dengan syarat yang ditentukan. Peranan pemerintah kota batu adalah sebagaai

(a) Stabilisator Modernisasi Pasar Besar Kota Batu

Modernisasi pasar besar kota batu pada tahun 2011 berupaya dalam memperbaiki fasilitas yang ada di kota batu. pembangunan pasar besar tersebut menggunakan bantuan dari PT.Panglima Capital Iqoni. Pemerintah kota batu

berkerja sama dengan PT Panglima Capital Iqoni menggunakan sistem kerjasama bangun serah guna, karena PT Panglima Capital Iqoni yang membiayai seluruh kegiatan dalam program modernisasi pasar besar kota batu. namun pemerintah tetap berperan di dalam modernisasi pasar besar kota batu. peran pemerintah dalam modernisasi pasar besar salah satunya sebagai stabilisator. Menurut Siagian (2014:142), peran pemerintah selaku stabilisator adalah salah satu peran yang harus di mainkan oleh pemerintah secara efektif ialah selaku stabilisator. Peran pemerintah selaku stabilisator yaitu dalam mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi gejolak-gejolak sosial. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara yaitu a) kemampuan selektif yang tinggi b) proses sosialisasi yang elegan tapi efektif c) melalui pendidikan d) pendekatan persuasi dan e) pendekatan bertahap tapi berkesinambungan

Sistem kerjasama dengan menggukan pola bangun serah guna merupakan pemilihan cara terbaik karena dengan keterbatasannya APBD. Pemerintah tetap mampu memodernisasi pasar besar kota batu. pemerintah kota batu tidak menyerahkan seluruh kegiatan kepada PT.Panglima Capital Iqoni. Pemerintah juga membantu PT.Panglima Capital Iqoni untuk mensosialisasikan program modernisasi pasar besar agar mampu diterima oleh pedagang pasar batu. dengan diadakan sosialisasi kepada pedagang, modernisasi pasar besar pun tetap mengalami masalah dalam pembangunan. Masyarakat menolak dengan kondisi yang ditawarkan oleh PT.Panglima Capital Iqoni.

Pemerintah tetap berusaha melakukan pendakatan kepada pedagang untuk mengetahui kebutuhan pedagang pasar besar kota batu dan pemerintah melakukan

pendekatan terhadap PT.Panglima Capital Iqoni. Kedua pendekatan tersebut pemerintah mengharapkan titik tengah dari hambatan modernisasi pasar besar kota batu.

(b) Modernisator Modernisasi Pasar Besar Kota Batu

Pasar besar kota batu merupakan aset pemerintah kota semenjak berdirinya pemerintah kota batu. pasar besar merupakan pasar tradisional kota batu yang memasok kebutuhan sehari dari industri yang berasal dari pemerintah kota batu sendiri. Keberadaan pasar besar kota batu kini semakin tertinggal dikarenakan berkembangnya kota batu sebagai kota pariwisata banyak bermuculan toko modern. Untuk itu peranan pemerintah sebagai modernisator diperlukan dalam pengembangan pasar tradisional kota batu. Menurut siagian (2014:142) peranan pemerintah sebagai modernisator adalah melalui pembangunan setiap Negara yang ingin menjadi modern. Untuk mewujudkannya diperlukan pembangunan yang sistematis, programatis, dan berkelanjutan. Pemerintah bertugas menggiring masyarakat ke arah kehidupan yang lebih modern seperti itu. Proses modernisasi harus terjadi di pemerintah itu sendiri.

Pemerintah kota batu membuat kegiatan modernisasi pasar sesuai dengan keinginan pedagang dan masyarakat kota batu yang ingin mengembangkan pasar besar kota batu. pemerintah kemudian mengkaji pemasukan tersebut sehingga muncul untuk mengadakan kegiatan modernisasi pasar melalui kerjasama dengan PT.Panglima Capital Iqoni. Kerjasama tersebut disusun secara sistematis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan modernisasi pasar

besar kota batu di programkan oleh pemerintah kota batu sejak tahun 2010 dan berjalan mulai tahun 2011. Pembangunan pasar besar kota batu mengalami masalah tentang produk yang ditawarkan PT. Panglima Capital Iqoni. Pemerintah kota batu tetap berusaha untuk mengarahkan Pedagang dan PT. Capital Iqoni untuk menemui pemahaman kebutuhan ketiga belah pihak.

Pasar besar merupakan aset pemerintah kota batu direncanakan pemerintah kota dengan harapan terwujudnya pasar modern yang mampu bersaing dengan toko maupun mall yang ada di kawasan pemerintah kota batu dan dengan di modernisasi pasar besar kota batu mampu meningkatkan pendapatan pemerintah kota batu.

b. Upaya Pemerintah dalam Modernisasi Pasar Besar Kota

Batu

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kota Batu, mempunyai peranan yang sangat penting selaku TTKSD dalam hal Modernisasi pasar terlebih lagi Modernisasi pasar besar. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kota Batu, berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batu Nomor 46 Tahun 2013 tentang penjabaran tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Selain itu, peran dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Modernisasi memang sangat perlu untuk dilakukan. Modernisasi yang dilakukan pemerintah salah satunya yaitu dari segi fisik. Pasar yang ada di Kelurahan Temas tersebut, bangunannya dirasa sudah tidak layak huni. Sarana dan prasarana yang ada juga tidak mendukung. Hal ini nantinya akan berdampak

pada pengunjung. Para pengunjung akan ragu-ragu untuk datang ke pasar tersebut ketika mereka melihat pasar yang ada bisa dibilang kumuh dan kurang terawat. Oleh sebab itu pemerintah melakukan Modernisasi pasar tersebut terkait dengan pembangunan sarana dan prasarananya. Modernisasi dilakukan agar toko-toko atau lapak-lapak tersebut menjadi layak.

Di dalam proses pembangunan untuk me modernisasi pasar ini, pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta maupun dengan masyarakat. Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah beserta dengan pihak swasta adalah dalam proses pembangunannya. Pemerintah meminta bantuan PT. Panglima Capital Iqoni untuk memodernisasi pasar besar . PT Panglima Capital Iqoni membangun dan mengelola pasar besar Kota Batu dengan menggunakan pola bangun serah guna. PT. Panglima Capital Iqoni memodernisasi pasar tersebut kemudian mengelolanya

Pemerintah daerah Kota Batu melalui PT. Panglima Capital Iqoni dalam hal memodernisasi pasar besar bekerja sama untuk mensejahterakan masyarakat Kota Batu khususnya yang bersangkutan dengan pasar besar. Pola bangun serah guna yang diberikan dari pemerintah Kota Batu dengan pt panglima capital iqoni berlangsung selama 20 tahun. Perjanjian menggunakan pasar untuk dikelola melalui kesepakatan yang ditulis dalam Draft MOU Nomor 09/MOU/422.205/2011 revisi ke 4 dari MOU sebelumnya. Program kegiatan modernisasi pasar besar Kota Batu seutuhnya menggunakan dana investor. Ruang lingkup yang dikerjasamakan oleh pemerintah Kota Batu dengan PT. Panglima Capital Iqoni mencakup desain bangunan, rekayasa, pembiayaan, konstruksi fasilitas. Dalam hal pengawasan masih dilakukan oleh pemerintah Kota Batu. Hal

tersebut ditujukan agar pasar besar masih beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan pasar dan menjaga agar pasar besar tidak lepas dari kepemilikan aset Kota Batu.

Program kegiatan kerjasama yang direncanakan pemerintah Kota Batu dengan PT. Panglima Capital Iqoni dengan pola bangun serah guna akan memberi pemasukan kepada pemerintah Kota Batu sebesar 20% dari 800.000 namun tidak ada dokumen yang mendasari nominal pendapatan tersebut yang menjelaskan sumber keuangan itu berasal darimana. Pemerintah Kota Batu beranggapan bahwa nominal tersebut berasal dari redistribusi pasar yang ada di pasar besar Kota Batu

Luas pasar besar Kota Batu yang merupakan aset pemerintah Kota Batu di serahkan kepada PT. Panglima Capital Iqoni seluas 44.525 m² luas pasar tersebut mencakup luas tanah dan bangunan. Modernisasi pasar besar yang di laksanakan sejak tahun 2010 seringkali di sosialisasikan kepada pedagang pasar dan masyarakat yang berhubungan dengan kegiatan pasar besar tersebut agar memahami tentang arti modernisasi pasar besar Kota Batu. Pasar besar Kota Batu perlu adanya modernisasi karena di anggap kurang layak untuk di jadikan pusat perdagangan Kota Batu. Pada awalnya pedagang menerima program kegiatan pasar Kota Batu untuk di modernisasi karena saling memahami apa arti dari modernisasi pasar tradisional. Namun setelah program kegiatan tersebut dilaksanakan oleh PT. Panglima Capital Iqoni Masyarakat kurang setuju. Karena pembangunan yang di lakukan oleh PT. Panglima Capital Iqoni di anggap mengurangi hak pedagang pasar besar Kota Batu.

Pebangunan pasar besar Kota Bati ini dibangun dengan model kontruksi berlantai 3 dengan jumlah kios 3800 kios. Pedagang berpikir jika area tersebut dibangun dengan penambahan jumlah kios itu dapat berdampak negative. Pedagang yang selama ini tercatat sebanyak 1400, dengan jumlah kios 3800 maka akan ada penambahan jumlah pedagang dalam jumlah besar hal tersebut di nilai akan menambang persaingan dalam proses kegiatan jual-beli barang dan akan menjatuhkan harga jual barang yang di jual oleh pedagang akibat dari ketatnya persaingan. Dengan luasa pasar 44.525 m² PT. Panglima Capital Iqoni mendistribusikan kepada pedagang 1 kios dengan luas 4 m². Luas kios seluas 4 meter persegi sangat tidak efisien karena kondisi pasar sekarang ini banyak pedagang yang memiliki luas kios lebih dari yang di tentukan oleh PT. Panglima Capital Iqoni. Luas kios yang dimiliki pedagang sesuai dengan volume barang dagangan seperti hanya pedagang sepatu, barang pecah belah dan sayuran. Terutama di pasar bagian barat yang sekarang ini di pergunakan untuk proses jual-beli sayuran. Luas kios yang dipergunakan untuk jual beli rata-rata memiliki luas 25 m² apabila luas kios hanya di informasikan hanya selus 4 m² maka pedagang akan merasa dirugikan.

Kios seluas 4 m² oleh PT. Panglima Capital Iqoni di distribusikan kepada pedagang pasar dengan penggantian biaya renovasi bangunan sebesar 28 juta per kios dengan cicilan 23.000 rupiah. Besaran nominal cicilan tersebut akan memberatkan pedagang pasar Kota Batu. Kemampuan daya beli sebesar 23.000 di anggap pemerintah Kota Batu sudah dapat di jangkau oleh pedagang pasar Kota Batu. Namun sebagian pedagang kecil seperti hanya pedagang bawang dan kelapa

besaran pergantian uang 23.000 perhari akan memberatkan. Karena di luar cicilan tersebut pedagang harus membayar restribusi yang lain seperti keamanan dan kebersihan. Keuntungan yang di peroleh pedagang bawang dan kelapa perhari hanya mampu mendapatkan keuntungan rata-rata 60.000 ribu/hari apabila keuntungan tersebut dipotong 23.000 dan biaya keamanan dan kebersihan sebesar 2000 rupiah maka keuntungan yang mampu di bawa pulang oleh pedagang sebesar 35.000. nominal tersebut di rasa kurang mampu mencukupi kebutuhan pedagang. Sedangkan masa kontrak antara pemerintahan Kota Batu dengan PT Panglima Capital Iqoni durasi kerjasama adalah 20 tahun.

Penolakan tidak hanya dari segi pembiyaan, jam operasional yang diberikan oleh PT. Panglima Capital Iqoni tidak bisa di terima oleh para pedagang. Jam operasional pasar besar Kota Batu sekarang ini mulai pukul 03.00 WIB – 21.00 WIB jam operasional pagi pasar besar ini merupakan jam pedagang sayuran berjualan. Sayuran yang di jual di pasar besar sebagian besar di jual pagi karena pembeli dari sayuran tersebut sebagian besar merupakan tengkulak yang berjualan berkeliling desa. pedagang keberatan apabila jam operasional pasar besar harus mengikuti PT. Panglima Capital Iqoni.

Penambahan infrastuktur pasar besar Kota Batu berupa rest area, pom bensin dan infrastruktur lainnya belum ada kejelasan dari pihak terkait dengan modernisasi pasar tradisional. Pedagang mulai berpikir bahwa beban atas penambahan infrastruktur akan di bebaskan kepada pedagang pasar besar. Pembebanan infrastruktur penunjang di tolak oleh pedagang karena pembangunan infrastruktur merupakan keuntungan pribadi dari PT. Panglima Capital Iqoni.

Modernisasi pasar besar yang dilakukan oleh PT Panglima Capital Iqono melalui sosialisasi pedagang diharapkan merubah pola berjualan dari yang tradisional menjadi modern. Hal tersebut mendapat penolakan dari berbagai pihak di kalangan pedagang. Perubahan tradisional kepada modern akan menguntungkan pihak atau pedagang yang mempunyai modal besar. Pedagang yang memiliki modal kecil akan tersingkir.

Modernisasi yang dilakukan pemerintah Kota Batu melalui TKKSD (Team Kegiatan Kerjasama Daerah) ini terkait dengan kerjasama dengan PT Panglima Capital Iqtono tentang bagaimana peningkatan kualitas dan sarana pasar menguntungkan para pedagang. Hingga saat ini program kegiatan modernisasi pasar besar belum mendapatkan jalan keluar yang saling menguntungkan berbagai pihak. Perlu adanya pengkajian ulang dengan memperhitungkan program kegiatan pembangunan yang sama menggunakan sistem bangun serah guna. Pola bangun serah guna pernah digunakan oleh pemerintah kota malang pada pembangunan Pasar Blimbing dan Pasar Dinoyo.

Pembangunan pasar blimbing juga mengalami kegagalan karena beberapa faktor. Kegagalan pembangunan pasar blimbing di akibatkan oleh penampungan sementara yang kurang layak untuk di gunakan karena dihimpit pasar modern dan sulitnya akses transportasi yang lewat di depan lokasi TPS. Pembangunan pasar blimbing mengalami tumpang tindih karena banyak pelaku pasar yang mencari keuntungan dengan adanya program kegiatan modernisasi pasar. desain dari pembangunan pasar blimbing pun mengedepankan pasar modern sehingga pasar tradisional berada di belakang pasar modern. Hal tersebut akan membuat kerugian

bagi pasar tradisional. Perjanjian pihak antara pemerintah dengan pihak ketiga menghasilkan harga jual kios antara 6 juta sampai 50 juta. Besaran harga jual tergantung dari luas kios yang akan di tempati pedagang pasar. namun hal tersebut perlu di kaji ulang. Sebelum adanya pembangunan pemerintah menjanjikan bahwa tidak adanya pemungutan biaya untuk kegiatan modernisasi pasar tersebut.

Pasar dinoyo berhasil di bangun oleh PT. CGA. Pada awalnya pasar dinoyo mengalami konflik antara pedagang dengan pemerintah karena pemerintah bertujuan untuk menggusur pasar tradisional dinoyo. Dengan bantuan komnas HAM antara pedagang, PT.CGA dan pemerintah mengadakan ke PN malang untuk di daftarkan secara tertulis dengan no: 21/UR/V/2012. Dengan demikian pedagang pasar sepakat untuk dipindahkan ke tempat penampungan sementara yang berada di kawasan merjosari. Pasar tradisional dinoyo yang sudah di tamping di area mojosari mengalami dampak yang cukup besar bagi pedagang pasar. pasar yang berada di mojosari kurang terjangkau akses kendaraan umum yang berakibat pelanggan lebih memilih pasar yang baru yang mampu di jangkau oleh akses transportasi umum.

Keberhasilan dari perbangindan tersebut perlu dipertimbangkan di dalam proses pembangunan pasar besar Kota Batu yang sama-sama menggunakan metode bangun guna serah kepada PT.Panglima Capital Iqoni. Pada dasarnya kebutuhan pedagang adalah diberi Haknya secara penuh. Pembangunan pasar besar Kota Batu perlu adanya kesepakatan antara pihak pedagang, PT Panglima Capital Iqoni dan Pemerintah Kota Batu. Dengan perjanjian selama 20 tahun tentu

mampu memperingan beban pedagang untuk melunasi cicilan kios. Pedagang yang memiliki kartu kepemilikan kios harus dipertimbangkan luas, kegunaan serta biaya teringan dengan membandingkan pembayaran dengan pendapatan yang di dapat pedagang pasar besar Kota Batu.

1. Faktor Mempengaruhi Modernisasi Pasar Besar Kota Batu

a. Efisiensi Modernisasi Pasar Besar Kota Batu.

Pembangunan pasar besar Kota Batu yang menggunakan sistem kerjasama dengan PT Panglima Capital Iqoni yang bertujuan untuk efisiensi anggaran serta mempercepat pengembangan fasilitas umum yang ada di Kota Batu. Namun dengan sistem pembangunan model bangun serah guna pemerintah harus menyerahkan sepenuhnya pasar besar Kota Batu kepada PT Panglima Capital Iqoni. Dengan perjanjian kontrak selama 20 tahun sesuai dengan perjanjian di dalam Evaluasi draft MOU tentang kerjasama antara pemerintahan Kota Batu dengan PT Panglima Capital Iqoni dalam pasal 12 ayat 2 yang menyatakan perjanjian kerjasama pengelolaan pasar besar Kota Batu akan berlangsung selama 20 tahun sejak di tanda tangani dan dapat di akhiri lebih awal berdasarkan ketentuan perjanjian kerjasama ini.

Perjanjian dengan PT. Panglima Capital Iqoni semulanya berlangsung selama 30 tahun namun setelah perhitungan ulang yang di lakukan pemerintah Kota Batu. Lamanya perjanjian tersebut sangat merugikan pemerintah Kota Batu. Hal tersebut sangat tidak efisien di dalam penggunaan aset pemerintah Kota Batu. Karena lama dari perjanjian tersebut menurut draft evaluasi akan mengurangi

masa pakai aset pemerintah Kota Batu dan setara dengan nilai sisa aset pemerintah Kota Batu

Pernjanjian kerjasama yang di berikan kepada pemerintah kota Batu. PT Panglima Capital Iqoni akan memberikan keuntungan 20% dari pendapatan redistribusi pasar yang berjumlah 800.000.000 per tahun. Hal tersebut guna efisiensi penggunaan sumber pendapatan pemerintah kota batu agar tidak mengalami penurunan yang terlalu signifikan. Namun hal tersebut tidak didasari dengan dokumen pendukung yang menyatakan bahwa pendapatan dari redistribusi kawasan pasar sejumlah nominal tersebut. Hal tersebut menjadi pertimbangan untuk pengkajian ulang karena pembangunan pasar besar merupakan penghasil dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat Kota Batu. Dengan menargetkan pendapatan 800.000.000 juta per tahun maka pembangunan kawasan pasar tersebut bisa disalah gunakan untuk keperluan yang lain.

Pembangunan pasar besar Kota Batu sangat efisien untuk penambahan jumlah pengunjung pasar besar. Dengan di bangunnya pasar besar maka fasilitas yang berada di kawasan pasar besar kota batu akan terlihat nyaman aman dan tertib. Dengan bangunan berlantai 3 maka akan menambah kesan megah untuk pasar besar tersebut. Penambahan kios yang sejumlah 4000 akan mampu menampung pedagang yang selama ini berjualan di tempat pejalan kaki. Karena jumlah pedagang yang memiliki hak pakai kios/los di pasar besar kota batu berjumlah 3500. Dengan penambahan 500 kios maka pedagang akan tertata rapi dan penambahan pendapatan kepada pemerintah Kota Batu.

Sebagian besar pedagang menolak dengan Luasan kios yang sebesar 4 m² dikeluhkan pedagang pasar besar Kota Batu. Luasan pasar tersebut kurang efisien bagi pedagang. Sekarang ini banyak pedagang yang memiliki kios dengan luas minimal 20 m². Luasan kios yang disosialisasikan PT. Panglima Capital Iqoni kurang mengerti kebutuhan pedagang dan tidak ada kejelasan tentang penggunaan kios. Apakah pedagang harus membeli kios dengan jumlah yang di butuhkan atau bagaimana. Pembangunan kios atau los harus lebih diperhatikan dalam modernisasi pasar. karena pasar yang sudah ada sekarang memuat barang dagangan yang begitu banyak. Apabila ada pengecilan kios maka pedagang harus mengurangi jumlah barang yang berada di tokonya. Dampak dari pengurangan barang tersebut akan menimbulkan peralihan konsumen dari pasar besar menuju pasar modern yang barang dagangannya lebih lengkap.

2. Efektifitas Modernisasi Pasar Besar Kota Batu

Pembangunan di kawasan kota wisata batu semakin bertambahnya tahun semakin modern dengan didirikannya wisata modern dan pusat perbelanjaan modern membuat keberadaan pasar besar kota batu menjadi kemunduran. Banyak fasilitas umum yang berada di tangan Pemerintah Kota Batu berkembang cepat menjadi lebih maju apabila mendapatkan bantuan dari investor lokal maupun manca negara seperti halnya Alon-Alon Kota Batu dan Batu Night Spektakuler. Fasilitas tersebut mampu menarik jumlah pengunjung yang berwisata menuju kota wisata batu. Dan banyak pengusaha perorangan yang membuka usaha di kawasan Kota Batu terutama pembukaan pertokoan modern di Kota Batu. Hal tersebut

menjadikan pasar tradisional mengalami kemunduran dan terkesan kalah dalam perkembangan. ;

Pemerintah Kota Batu bekerja sama dengan PT. Panglima Capital Iqoni sebagai Investor yang akan memodernisasi pasar besar kota batu. Pemerintah kota batu bekerja sama dengan PT. Panglima Capital Iqoni sejak tahun 2010 dengan harapan pasar besar kota batu mengalami perubahan pada dua tahun kedepan semenjak perjanjian dengan PT. Panglima Capital Iqoni tertanda tangani. Output yang diharapkan oleh masyarakat adalah pembangunan yang mengerti akan kebutuhan pedagang pasar besar kota batu.

Pemerintah kota bekerja sama dengan PT. Panglima Capital Iqoni dengan menggunakan model Bangun Serah Guna yang diserahkan secara sepenuhnya kepada PT. Panglima Capital Iqoni dengan hasil pemerintah tidak mengeluarkan biaya dan pembangunan pasar besar kota batu akan segera tercapai.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Peranan Pemerintah Daerah Dalam Modernisasi Pasar Besar yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan pemerintah daerah dalam modernisasi adalah sebagai:

1. Stabilisator

Program modernisasi pasar besar Kota Batu mengalami konflik dalam proses pembangunannya, Pemerintah Kota Batu meredam konflik yang terjadi antara pedagang Kota Batu dengan investor. Masalah yang timbul di pembangunan pasar besar terutama di luasan bangunan dan pembayaran kios. Pemerintah kota bat uterus mengadakan sosialisasi pasar besar kota batu untuk mengupayakan teredamnya konflik dan terciptanya keberhasilan modernisasi pasar besar.

2. Modernisator

Pemerintah Kota Batu menggiring pedagang pasar besar agar mau menerima modernisasi pasar besar Kota Batu. dan berpikir lebih modern tentang tatacara berjualan dan tata cara penarikan pengunjung pasar besar Kota Batu

Program modernisasi pasar besar dikerjakan dengan menggunakan program bantuan dari investor. Pemerintah menggunakan kerjasama secara bangun serah guna kepada investor dalam prosesnya banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Batu, terutama perlawanan pedagang pasar besar terhadap program yang diberikan pemerintah Kota Batu, sebagian besar pedagang menolak dengan ukuran kios dan harga cicilan yang tawarkan oleh pemerintah Kota Batu. Jumlah cicilan yang dengan jumlah 23.000 ribu, Pedagang menolak karena pendapatan pedagang tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan sekaligus pemenuhan kebutuhan sehari. Ukuran kios yang berukuran 4 m² tidak mampu menampung barang dagangan, maka akan menimbulkan pengurangan display yang berada dalam kios. Pengurangan barang dagangan dalam kios akan berdampak kepada konsumen. Karena konsumen akan memilih toko dengan display barang yang lebih lengkap. Dengan begitu maka akan timbul persaingan dengan pedagang-pedagang baru yang bermodal besar untuk menempati pasar besar Kota Batu. Secara tidak langsung pedagang yang bermodal kecil akan tersingkirkan dengan sendirinya karena konsumen berpindah ke pedagang yang memiliki barang dagangan yang lebih banyak. Upaya pemerintah Kota Batu melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku TTKSD. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berupaya merevisi draf MOU dari program modern pasar besar dan mensosialisasikan kembali kepada seluruh masyarakat yang bersangkutan dengan program modernisasi pasar besar. Berdasarkan hasil evaluasi draft MOU. Pemerintah Kota Batu berupaya tetap menjalankan fungsi pengawasan. Agar hak pedagang dapat diberikan kepada masyarakat

Efisiensi dari program modernisasi pasar besar Kota Batu adalah program pembangunan tersebut memanfaatkan bantuan dari Investor menjadikan APBD Kota Batu dapat dipergunakan untuk pembangunan di sektor yang lain. Desain yang digunakan Investor mampu memasukkan pedagang liar ke dalam pasar besar karena pasar yang baru memuat jumlah kios yang sangat banyak. Pemerintah Kota Batu tetap mendapatkan pendapatan dari adanya pasar besar Kota Batu.

Efektifitas dari program modernisasi pasar besar Kota Batu adalah program tersebut dikerjasamakan dengan PT. Panglima Capita Iqoni sehingga tujuan dari modernisasi akan lebih cepat tercapai. Namun dalam prosesnya pemerintah Kota Batu membantu berjalannya proses modernisasi pasar besar Kota Batu. karena outcome dari program modernisasi pasar besar merupakan rencana pemerintah Kota Batu.

B. Saran

- Dalam mengadakan program pembangunan pemerintah daerah harus mengetahui kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat.
- Pemerintah Kota Batu harus memperhatikan kondisi pedagang terutama dalam hal keuangan dan mengkaji ulang jumlah cicilan dengan lama perjanjian pengelolaan
- Memberikan hak paten yang berdasar hukum, yang menerangkan bahwa penggunaan ukuran kios sebelum dan sesudah di modernisasikan pasar besar Kota Batu.

- Dalam perjanjian kontrak yang diberikan selama 20 tahun, cicilan pembayaran kios pasar diperingan, dan cicilan dilakukan selama perjanjian dengan investor



DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah. 2015. *Manajemen Strategi*. Jakarta: Mitra Wacane Median
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta Arikunto
- Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hanif Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT Grasindo
- HAW. Widjaja. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kaho, Josef Riwu. 2007. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional (Edisi Keempat). 2008. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Koswara E., 2001, *Teori Pemerintahan Daerah*, Institut Ilmu Pemerintahan Press, Jakarta
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Maryaeni. 2005. *Metode Penelitian Kebudayaan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Miles, Huberman, Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis*. Singapore: Sage Publication
- Moleong. L. J. 2000. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Moleong, L. J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muluk, Khairul. 2007. *Desentralisasi dan pemerintahan daerah*. Malang: Bayumedia
- Nasir, Muhammad. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Pamudji. 1985. *Kerjasama Antar Daerah*. Jakarta: PT. BINA AKSARA

Rozali Abdullah. 2007. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta : PT Raja Grasindo.

Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (pemerintahan yang baik) dalam rangka otonomi daerah*. Bandung: Mandar Maju

Shofan dkk. 2006. *Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis Good Governance*. Malang: SPOD

Siagian, Sondang P. 1988. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Siregar, Doli D. 2004. *Manajemen aset: strategi penataan konsep pembangunan berkelanjutan secara nasional dalam konteks kepala daerah sebagai CEO's pada era globalisasi & otonomi daerah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Solihin, Dadang. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses*

Steiner dkk. 1988. *Kebijakan dan Strategi Manajemen*. Jakarta: ERLANGGA

Suprpto, Tri. 2006. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam Masa Otonomi Daerah Tahun 2000-2004*

Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang (UM Press)

Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: UB Press

Tangkilisan, Hessel, Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia

Jurnal

Fauzi Ahmad. *Perlawanan Pedagang Pasar Blimbing*. 17

Khairul muluk.dkk 2015 *Revitalization of traditional market into a modern market in the prespective of local governance Theori*. IOSR Journal of Humanities and social science. Volume 20 issue 9

Pekei, Dkk. 2014. *The Effectiveness Of Local Asset Management (A Study On The Government Of Jayapura)*. ISSN (Print): 2319 – 801X, Vol 3

Ryel,Heung, kim. 2015. *culture and tourism oriented local tradisional market strategies in korea*. EAR15italy Conference. Vol 21

Undang-Undang

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kota Batu

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perlindungan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengawasan Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1975

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Website

www.batukota.bps.go.id

DAFTAR NARASUMBER

NO	NAMA	STATUS	ALAMAT	Setuju /Tidak
1	Bapak Andhang	Kepala Bidang di BPKAD Kota Batu	Jl Raya Arjuno RT 01 RW 06 Desa Punten	Setuju
2	Bapak Andi	Staff BPKAD Kota Batu	Jl Gondorejo Desa Beji Kota Batu	Setuju
3	Bapak Rahman	Staff Diskoperindag Kota Batu	Jl Srikoyo RT 01 RW 06 Kota Batu	Setuju
4	Bapak Widi	Staff UPTD Pasar	Jl Dr Soetomo RW 01 RW 06 Kec Junrejo Kota Batu	Setuju
5	Bapak Oki	Anggota Himpunan Pasar	Jl Kacapiring Kecamatan Dau Kab Malang	Tidak
6	Bapak Sunarto	Pedagang Pasar Besar	Dusun Kaliputih No 43 Kelurahan Sisir	Tidak
7	Bapak Dul Slamet	Pedagang Pasar Besar	Jln Indragiri No 57 Desa Sumberejo	Tidak
8	Bapak Yusuf	Pedagang Pasar Besar	Jln Dewi Sartika RT 06 RW 02 Kelurahan Temas	Tidak
9	Bapak Panji	Pedagang Pasar Besar	Jl Abdul Ghani Atas desa pesanggrahan	Tidak
10	Saudari Nadya	Pengunjung Pasar Besar	Jl Hasanudin No 150 Kec Junrejo Kota Batu	Setuju



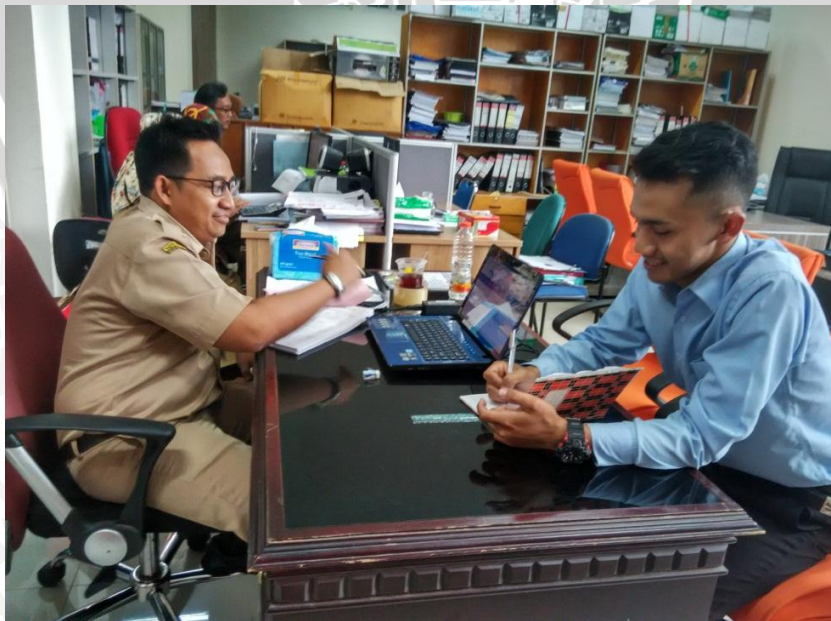
Kondisi Tempat Parkir Pasar Besar



Kondisi Kios Pasar Besar



Bapak Andhang Kabid BPKAD



Bapak Andi Staff BPKAD



Bapak Rahman Staff Diskoperindag



Bapak Oki Pedagang Jasa Potong Rambut (Anggota Himpunan Pasar)



Bapak Sunarto Pedagang



Bapak Dul Slamet Pedagang Pasar



Bapak Panji Pedagang dan Bapak Widi Staf UPTD



Bapak Yusuf Pedagang



PEDOMAN WAWANCARA

FOKUS PENELITIAN

1. a. Peranan Pemerintah dalam Modernisasi Pasar Besar
 - (a) Stabilisator Modernisasi Pasar Besar
 - (b) Modernisator Modernisasi Pasar Besar
- b. Upaya Pemerintah dalam Modernisasi Pasar Besar
2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi peranan pemerintah dalam modernisasi pasar besar
 - a. Efisiensi
 - b. Efektifitas



CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Doni Fajar Prandana
Tempat, Tanggal : Malang, 15 -07-1994
Lahir
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Alamat : Jl. Hasanudin No.149
RT01/RW06
Desa Junrejo Kecamatan
Junrejo Kota Batu
Handphone : 085604700057
E-mail : donifajar503@gmail.com



DATA PENDIDIKAN

FORMAL :

SD : SD Negeri 01 Kota Batu
SMP : SMP Negeri 03 Kota Batu
SMA : SMK PGRI 03 Tlogomas Malang

NON FORMAL

-

PENGALAMAN PEKERJAAN

NO	PEKERJAAN	TAHUN
1	Tenaga Pendukung dalam team Asistensi Penyusunan dan Pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran 2015	2015
2	Tenaga Ahli Pendamping untuk Penyusunan CALK Laporan Keuangan Tahun 2015	2016
3	Tenaga Ahli Pendamping untuk Evaluasi Kertas Kerja Aset	2016
4	Tenaga Ahli Pendamping rekonsiliasi Laporan Keuangan berbasis akrual	2016
5	Tenaga Ahli Pendamping Mapping rekening berbasis akrual	2016

DATA KEMAMPUAN

- Microsoft Office (Ms Word, Ms Excel, Ms PowerPoint)
- Instalasi Komputer

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



UNIVERSITAS BRAWIJAYA





LAMPIRAN